

**GERAKAN SEPARATISME PENGUASA REGIONAL ARAB
PADA PENGHUJUNG ERA UTSMANIYAH 1741-1849 M**

SKRIPSI



Oleh :

**Haikal Pasha Gamilang
NIM : U20174025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**GERAKAN SEPARATISME PENGUASA REGIONAL ARAB
PADA PENGHUJUNG ERA UTSMANIYAH 1741-1849 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



Haikal Pasha Gamilang
NIM : U20174025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**GERAKAN SEPARATISME PENGUASA REGIONAL ARAB PADA
PENGHUJUNG ERA UTSMANIYAH 1741-1849 M**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh :

Haikal Pasha Gamilang
Nim: U20174025

Disetujui pembimbing


Dahimatul Afidah, M.Hum.
NIP. 199310012019032016

**GERAKAN SEPARATISME PENGUASA REGIONAL ARAB PADA
PENGIUJUNG ERA UTSMANIYAH 1741-1849 M**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan
Peradaban Islam

Hari: Kamis
Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang


Dr. Akhijat, S. Ag., M.Pd.
NIP. 197112172000031001

Sekretaris


Maulida Dwi A., S.Kom., M.T.I.
NIP. 199308302020122006

Anggota :

1. Dr. H. Amin Fadlillah SQ., MA.
2. Dahimatul Afidah, M.Hum.




Menyetujui

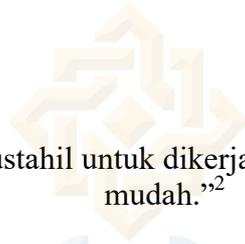
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



MOTTO

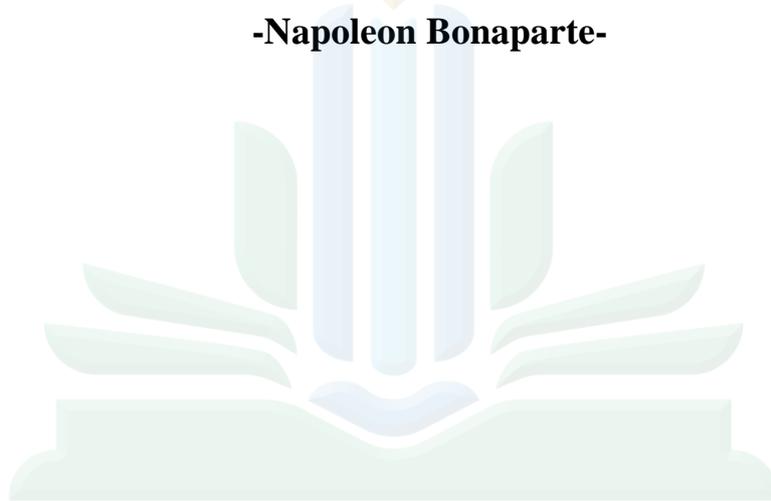
“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.”¹

-Ali bin Abi Thalib-



“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, hanya tidak ada sesuatu yang mudah.”²

-Napoleon Bonaparte-



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Ilham Fikriansyah, “50 Kata-kata Ali bin Abi Thalib yang Bijak dan Penuh Makna,” diakses pada 08 Juli 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7198681/50-kata-kata-ali-bin-abi-thalib-yang-bijak-dan-penuh-makna>.

² Shafira Chairunnisa, “90 Motto Skripsi Terbaik yang Unik dan Penuh Makna dari Tokoh Dunia,” diakses pada 08 Juli 2024, <https://berita.99.co/contoh-motto-skripsi-terbaik/>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Karya ini saya persembahkan untuk orang tua Nenek, Ibu dan Bapak saya atas jerih payah dan do'anya selama ini. Beliauah yang telah membimbing, mendidik dan mengajari saya untuk tetap sabar, bekerja keras serta mensyukuri apa yang telah didapat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Haikal Pasha Gamilang, 2024: Gerakan Separatisme Penguasa Regional Arab Pada Penghujung Era Utsmaniyah 1741-1849 M.

Kata Kunci : *Gerakan, Separatisme, Penguasa, Arab, Utsmaniyah.*

Gerakan Separatisme menjadi gerakan yang mengancam kedaulatan Utsmaniyah sejak dunia memasuki abad ke-18 M. Pemerintahan Utsmaniyah telah melakukan pengabaian pengawasan ketat pada provinsi Arab dimulai dari masa Sultan Mahmud I (1730-1754) sehingga dengan ini menyebabkan penguasa regional di wilayah Arab semakin independen dan otonom. Zahir al-Umar dan Muhammad Ali sebagai tokoh pemimpin gerakan separatisme Arab telah membuktikan bahwa mereka muncul dan menjadi tantangan bagi kedaulatan Khilafah Turki Utsmaniyah.

Fokus kajian dalam penelitian ini terletak pada : 1). Bagaimana latar belakang munculnya gerakan separatisme ini? 2). Bagaimana bentuk dari gerakan separatisme ini? 3). Dampak apa saja yang ditimbulkan dari kemunculan gerakan semacam ini pada pemerintahan Utsmaniyah tahun 1741-1849 M? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana munculnya gerakan Separatisme di tanah Arab dan bagaimana bentuknya, memberikan analisis historis terhadap gerakan Separatisme yang didalangi oleh penguasa provinsi Arab dan memaparkan bagaimana mereka mendirikan lalu mengelola gerakan pemisahan diri ini.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan studi kepustakaan. Data yang diambil dari sumber tertulis berupa catatan-catatan harian, Buku, isi surat konvensi, Artikel dan beberapa sumber tertulis lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang melalui beberapa tahapan seperti : Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran), dan Historiografi (penulisan sejarah). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sejarah dan politik, sedangkan teori yang digunakan adalah teori ambisi politik Joseph Schlesinger dan teori pilihan rasional James Coleman.

Berdasarkan fokus kajian di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Munculnya gerakan Separatisme yang ada di regional Arab pada tahun 1741-1849 disebabkan oleh melemahnya keadaan internal Utsmaniyah lebih lagi di regional Arab. 2). Ambisi kuat yang dimiliki oleh Zahir al-Umar dan Muhammad Ali dalam memperoleh kekuasaan mengantarkannya kepada keberhasilan membentuk gerakan separatisme yang cukup lama berdiri, mengelola dan membangun kerajaannya sendiri. 3). Dengan adanya gerakan separatisme ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi pemerintahan Utsmaniyah sehingga berakibat jatuhnya pemerintahan ini pada 03 Maret 1924 M.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nyalah, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sebagai tanda rasa syukur penulis, semua pengalaman selama proses penulisan skripsi akan penulis jadikan sebagai refleksi atas diri penulis untuk kemudian akan penulis implementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku konstruktif dan produktif untuk kebaikan dan perbaikan semua warga bangsa.

Terselesainya penulisan skripsi ini, penulis sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Dr. Win Usuluddin, M.Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.

5. Dosen Pembimbing Dahimatul Afidah, M.Hum. yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terakhir adalah teruntuk teman-teman saya angkatan 2017 Sejarah dan Peradaban Islam. Hakim, Qoimatu, Musrifah, Nur, Citra dan Pujo teman-teman ini telah banyak membantu penulis dalam menumbuhkan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis minta maaf yang sebesar besarnya.

Jember, 30 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Istilah	9
G. Studi Terdahulu	12
H. Kerangka Konseptual.....	19
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN SEPARATISME	28
A. Pemerintah Utsmaniyah Abad ke- 18	28
B. Kondisi Masyarakat Arab Utsmaniyah Abad ke-18.....	39
C. Munculnya Penguasa Otonom Arab	43

BAB III	BENTUK GERAKAN SEPARATISME ZAHIR AL-UMAR (1741-1775) DAN MUHAMMAD ALI PASHA(1805-1849)....	57
	A. Zahir Al-Umar di Palestina Utara (1740 – 1775 M)	57
	B. Muhammad Ali Pasha di Mesir (1805 – 1849 M).....	70
BAB IV	DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI MUNCULNYA GERAKAN SEPARATISME DI WILAYAH ARAB.....	80
	A. Reformasi Kebudayaan Arab	82
	1. Pengaruh Perancis.....	82
	2. Pengaruh Inggris	87
	B. Reformasi Sistem Pemerintahan Utsmaniyah	93
BAB V	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104
	DAFTAR PUSTAKA	106
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	109
	BIODATA PENULIS.....	110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke-18 Pemerintahan Utsmaniyah mendapatkan tantangan besar. Wilayah territorial pemerintahan Utsmaniyah yang begitu luas mencakupi wilayah Eropa Tenggara, sebagian besar tanah Arab Timur Tengah dan wilayah Afrika bagian utara yang memiliki beragam macam perbedaan masyarakatnya mulai dari perbedaan budaya, bahasa, tradisi, iklim, kepercayaan dan lain-lain menyebabkan munculnya tantangan tersendiri. Melemahnya otoritas pusat Istanbul selaku ibu kota pemerintahan Utsmaniyah yang didukung dengan lemahnya para Sultan-sultan Utsmani semenjak awal abad ke-17 M. Sultan Mahmud I berkuasa pada 1730-1754 M juga termasuk dalam kategori Sultan yang lemah dan itu merupakan periode munculnya gerakan separatis Zahir al-Umar di Palestina Utara.

Munculnya gerakan separatisme dalam pemerintahan Utsmaniyah banyak bagiannya. Semenjak Utsman I mendirikan pertama kali pemerintahan Utsmaniyah pada tahun 1300 M sampai pada masa runtuhnya pemerintahan ini tahun 1924 M pastilah beragam macam munculnya gerakan-gerakan separatisme itu. Namun, penulis mengambil bagian dari gerakan separatisme yang berasal dari tanah Arab atau budaya dan masyarakatnya menggunakan bahasa Arab. Mulai dari gerakan separatisme yang dipelopori oleh Zahir al-Umar di tanah Palestina, lalu Ali Bey al-Kabir di Mesir dan terakhir Muhammad Ali di Mesir pula. Mesir semenjak masuk ke dalam

wilayah provinsi Utsmaniyah pada 23 Januari 1517 M atas penaklukan yang di kepalai oleh Sultan Selim I yang memiliki julukan “Sang Pemurung” terbilang cukup sering mendapatkan peristiwa pemberontakan oleh sisa-sisa para Mamluk di sana. Ketika Sultan Selim wafat pada tahun 1520 M dan digantikan oleh penerusnya yaitu anaknya sendiri Sulaiman I para gubernur yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur provinsi Mamluk, mereka diberi amanah lanjutan dengan menjabat sebagai gubernur lagi pada fase pemerintahan yang sudah berganti Utsmaniyah. Janbirdi gubernur Mamluk yang melakukan pemberontakan pada tahun 1521 M, selanjutnya gubernur baru Mesir yang bernama Ahmad Pasha yang juga ingin memisahkan diri dari pemerintahan tunggal Utsmaniyah pada tahun 1523 M.

Ahmad Pasha sendiri bercita-cita dan berambisi besar menjadi wazir agung pemerintahan pusat Utsmaniyah atau menjadi perdana menteri. Karena ambisi dia tidak terpenuhi menjadi wazir agung maka ketidakpuasan menguasai jiwanya dan dia secara sepihak mengangkat dirinya sebagai penguasa independen Mesir pada tahun 1523 M. Dia tiba di Mesir pada bulan September dan langsung memerintahkan melucuti seluruh tentara Utsmaniyah yang ditugaskan di Kairo dan memaksa mereka dipulangkan dari sekian banyak pasukan infanteri Utsmaniyah. Sebelumnya Mesir terlibat pemberontakan pada Istanbul akibatnya banyak dari kalangan pemberontak yang berasal dari Mamluk dan orang-orang Badui di penjara namun setelah kedatangan Ahmad Pasha di Kairo dia membebaskan seluruh residivis pemberontak dengan membayar kesetian mereka kepadanya.

Setelah dia menyatakan diri sebagai Sultan baru dan penguasa independen Mesir, dia memerintahkan agar doa di sholat Jum'at memuji namanya dan mencetak uang logam yang bernamakan namanya. Pemberontakan dia berumur pendek, tentara yang masih loyal terhadap pemerintah Istanbul melakukan serangan yang membuat Ahmad Pasha terdesak hingga ke pinggiran desa dan akhirnya berhasil ditangkap. Lalu dia dihukum penggal pada tahun 1524 M. Selanjutnya, Istanbul mengirimkan gubernur baru yang lebih kompeten dan memiliki loyalitas tinggi. Terbukti kehebatan Sultan Sulaiman I meredakan gerakan Separatis yang ada di wilayah Arab hingga akhir masa kekuasaannya.

Kebudayaan di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini³. Sehingga dengan hal itu daerah kekuasaan Zahir al-Umar di Palestina, Ali Bey dan Muhammad Ali di Mesir, mempunyai beberapa aspek kesamaan dari segi latar belakang. Pemerintah Utsmaniyah yang beraliran Sunni dengan kesamaan yang dianut oleh kaum Arab membuat mereka menjadi satu kesatuan yang setidaknya lebih kokoh dibanding dengan daerah kekuasaan Utsmaniyah yang berada di Balkan Eropa bagian Tenggara. Menjadi pertanyaan tersendiri mengapa abad ke-18 adalah tahun-tahun dimana keretakan hubungan Istanbul dengan daerah Arab yang dikuasainya.

³ Yan Mujiyanto, Zaim Elmubarak, *Pengantar Ilmu Budaya*, (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), 10.

Sebelum zaman nasionalisme, bangsa Arab membayangkan jati diri mereka dalam makna yang lebih luas, kemungkinan akan lebih didasarkan pada agama daripada etnis. Bagi masyarakat Arab yang sebagian besar adalah penganut muslim Sunni, Utsmaniyah adalah penguasa yang sangat dapat diterima. Kenyataan bahwa pusat administrasi telah pindah dari tanah Arab ke Istanbul, sebuah kota yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia, tampaknya tidak menjadi masalah bagi orang-orang pada zaman itu. Bangsa Arab tampaknya lebih pragmatis ketimbang ideologis dalam menilai siapa yang berkuasa. Mereka jauh lebih peduli dengan permasalahan hukum dan ketertiban, serta perpajakan yang wajar, daripada memikirkan apa artinya bagi bangsa Arab yang dikuasai oleh orang-orang Turki⁴

Pada awal masa pemerintahan mereka, Kekaisaran Utsmani dianggap sebagai salah satu pemerintahan terbaik yang pernah memerintah umat Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah pembela agama yang gigih dan menentang keras kaum kafir. Dengan alasan ini, wilayah kekuasaan mereka berkembang melalui berbagai penaklukan yang diberkahi oleh Allah dan wakil-wakilnya. Mereka menguasai wilayah terluas di seluruh dunia dan mengendalikan berbagai kerajaan yang tunduk kepada mereka. Mereka tidak mengabaikan kewajiban untuk menjaga wilayah dan perbatasan mereka. Mereka mendorong praktik agama Islam dan memberikan penghormatan kepada para pemimpin agama, mendukung pemeliharaan Dua Kota Suci, Mekkah dan Madinah, serta

⁴ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah*, terj. Fahmy Yamani (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 28.

menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dengan menerapkan hukum dan syariat Islam.⁵

Pemerintah Utsmaniyah di permukaan berhasil menyerap dunia Arab ke dalam kekuasaannya. Selama dua ratus tahun pemerintahan Utsmaniyah telah mempertahankan kekuasaan mereka dari ujung Selatan Jazirah Arab atau sebagian Yaman, sampai di perbatasan Maroko Afrika Barat Laut. Masyarakat Arab sudah terbiasa selalu menyelipkan doa untuk Sultan Utsmaniyah pada setiap waktu dan seringnya ketika melaksanakan sholat Jum'at. Mereka rela mengirimkan anak-anak mereka untuk ikut andil berpartisipasi dalam perang yang diperintahkan oleh Sultan serta rutin membayar pajak melalui agen Sultan di wilayah masing-masing. Sebagian besar profesi masyarakat Arab kala itu sebagai petani di pedesaan dan menjadi pengrajin atau pedagang di perkotaan, mereka menyetujui bahwa mereka dikuasai oleh orang non-Arab mereka hanya mengharapkan keamanan untuk diri mereka sendiri, harta mereka dan pelestarian syariat-syariat Islam.

Penelitian sebelumnya yang mendekati dengan penelitian ini seperti Samsul Ahmad yang berjudul Peranan Muhammad Ali dalam Pengembangan Islam, penelitian ini lebih fokus kepada kinerja bagaimana Muhammad Ali memerintah Mesir, apa saja pencapaiannya. Belum mampu menjawab bagaimana Muhammad Ali mencoba memisahkan diri dengan pemerintahan Utsmaniyah. Penulis sendiri melakukan penelitian ini dengan tujuan

⁵ Salmon, *Kisah Pertemuan Ottoman*, (London: Royal Asiatic Society, 1921), 41.

mengulas bagaimana dan apa alasan Muhammad Ali mengkhianati pemerintahan yang sebelumnya memberikan mandat kepada dia sebagai seorang Pasha di sana.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana latar belakang munculnya gerakan separatisme di tanah Arab pada pemerintahan Utsmaniyah?
2. Bagaimana bentuk gerakan separatisme yang ada di tanah Arab?
3. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh gerakan separatisme ini?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Judul penelitian ini “GERAKAN SEPARATISME PENGUASA REGIONAL ARAB PADA PENGHUJUNG ERA UTSMANIYAH”. Dua ratus tahun terakhir sebelum kejatuhannya, pemerintahan Turki Utsmani banyak mengalami fase pemberontakan atau dapat dibilang muncul banyaknya gerakan-gerakan politik yang mencoba memisahkan diri dari entitas kekuasaan tunggal pemerintah Islam Utsmaniyah. Mulai dari bangsa-bangsa Balkan mereka sudah mulai tercekoki oleh doktrin nasionalisme dan kemerdekaan yang di usung oleh negara-negara maju seperti Prancis dan Inggris kala itu. Tak hanya di wilayah Balkan, pemberontakan juga terjadi di tanah Arab sehingga membuat pemerintahan Istanbul kewalahan dengan banyaknya daerah yang mulai melawan pemerintahannya.

Berdasarkan uraian barusan yang ditulis oleh penulis maka penelitian ini akan berfokus pada gerakan-gerakan separatisme yang terjadi di tanah

Arab saja yang dibatasi dengan kurun waktu tahun 1741-1849 M. pada batas waktu penelitian ini, integritas pemerintahan Utsmaniyah mulai terancam di wilayah Arab yang ditimbulkan oleh Zahir al-Umar, Ali Bey dan Muhammad Ali. Mereka adalah penguasa Palestina dan Mesir di masanya. Walaupun pada akhirnya gerakan-gerakan semacam ini dapat diatasi oleh pemerintahan Istanbul namun ketika mereka sudah saling berkolaborasi maka disitulah kekuatan penuh Utsmaniyah tersaingi oleh pemimpin provinsi mereka sendiri.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana gerakan separatisme yang terjadi di wilayah regional Arab. Apa dari tujuan mereka untuk mengobarkan gerakan-gerakan pemisahan ini dan bagaimana gerakan mereka dapat terhenti. Lalu dampak apa saja yang ditimbulkan oleh gerakan separatisme ini baik itu bagi masyarakat Arab maupun bagi pemerintahan pusat Istanbul. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya gerakan separatisme di tanah Arab pada tahun 1741-1849
2. Mendeskripsikan bentuk dari gerakan separatisme ini
3. Mendeskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh gerakan ini

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian apapun pasti mempunyai manfaat yang positif dan ketika penelitian itu dilakukan, maka penulis membagi manfaat penelitian dalam dua bagian, manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan di dalam bidang kesejarahan khususnya dalam sejarah Gerakan Separatis Penguasa Regional Pada Penghujung Era Utsmaniyah Tahun 1741 – 1849 M.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis karena dalam penelitian ini terbukanya wawasan baru untuk mengenal dan mempelajari gerakan-gerakan separatis yang ada di Timur Tengah sana, sehingga kedepannya penulis dapat memberi argument terhadap kajian-kajian gerakan separatisme yang pernah terjadi dalam pemerintahan Utsmani.

b. Bagi Lembaga

Penelitian merupakan wadah yang nemapung aspirasi dan semangat intelektual muda terlebih kalangan muda intelektual muslim. Penelitian ini dapat menambah koleksi dokumen penelitian mengenai kajian eksistensi gerakan separatis pada

abad-abad terakhir Daulah Utsmaniyah serta menjadi referensi mengenai faktor-faktor melemahnya Turki Utsmani.

c. Bagi Masyarakat

Kalangan masyarakat terkadang rentan dengan isu-isu gerakan pemberontakan yang disetiri oleh pemimpin-pemimpin setempat. Dunia yang sedang mengalami arus percepatan globalisasi, informasi bertebaran dengan begitu cepat dan massif maka itu semua mudah masuk individu manusia. Sehingga penelitian ini memberi tawaran manfaat bagi masyarakat untuk dapat memahami situasi politik di daerahnya masing-masing, sehingga masyarakat tidak mudah disetir oleh pemimpin setempat mereka. Serta pentingnya diskusi para pejabat lokal dan pusat untuk saling menumbuhkan pemahaman dan tidak saling menimbulkan kesalahpahaman.

F. Definisi Istilah

1. Separatisme

Separatisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:820), adalah pandangan atau paham yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memecah belah suatu golongan atau bangsa. Istilah Separatis atau Separatisme merujuk pada perilaku individu, kelompok, atau komunitas yang berada dalam suatu entitas besar, yang bermaksud untuk memisahkan diri atau meninggalkan entitas besar tersebut dengan tujuan untuk menjadi negara atau bangsa yang merdeka secara

independen.⁶ Menurut Imam Maliki, separatisme atau pemberontakan merupakan sikap menolak untuk patuh dan menghormati otoritas yang sudah mapan dan bertindak sesuai dengan kebenaran, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dengan cara menggulingkannya melalui interpretasi yang kreatif.⁷ Atau dapat juga separatis adalah sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan al-Imam al-Azham (kepala negara) atau wakilnya,⁸ dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.⁹

2. Penguasa

Orang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang terjadi pada orang lain.¹⁰ Menurut Machiavelli penguasa adalah seorang yang mengutamakan kepentingan negaranya. Dia harus dapat memisah antara kepentingan negara dengan nilai-nilai moral, karena menurutnya kekuasaan bukanlah alat untuk mengabdikan pada jaminan, keadilan dan kebebasan dari Tuhan.

3. Regional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regional merujuk pada daerah atau kedaerahan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai suatu

⁶ Sefriani, "Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka," *Artikel Jurnal: Unisia*, No.47, (2003), 41, <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/download/5277/4702/8993>.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Sinar Grafik, Maret 2005), 50

⁸ Muhammad Amin Suma et al, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 59.

⁹ Karlinda Keledar, "Separatisme menurut Pandangan Empat Imam Mazhab" (Skripsi, Institut Negeri Islam Ambon, 2020), 110.

¹⁰ Jhon R Schemerborn et al, *Basic Organizational Behavior* (Osborn 2 edition, 1998), 195.

wilayah yang memiliki karakteristik seragam tertentu yang membedakannya dari wilayah lainnya. Karakteristik keseragaman tersebut dapat berupa aspek fisik atau sosial, seperti kegiatan ekonomi, bentuk budaya, sistem pemerintahan, kondisi geografis, dan sebagainya. Selain itu, regional seringkali dikaitkan dengan wilayah atau daerah yang memiliki kedaulatan dan dipimpin oleh seorang pemimpin tertentu.¹¹

4. Arab

Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan ini sudah diberikan sejak zaman dahulu kala kepada Jazirah Arab.¹² Dalam sejarah, penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada naskah Assyiria dari abad ke-9 SM yang menurut kebanyakan peneliti memiliki arti adalah orang-orang gurun (badui).¹³ Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah Barat, di sebelah Timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian Selatan, di sebelah Utara dibatasi oleh negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak lalu di sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Arab sendiri kalau dilihat dari silsilah keturunannya maka akan nyambung sampai ke Nabi Isma'il melalui

¹¹ Zulfa Ardhini, "Regional adalah Kedaerahan, Penggunaan istilah dan contohnya," diakses pada 25 Mei 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6605527/regional-adalah-kedaerahan-penggunaan-istilah-dan-contohnya>.

¹² Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 1.

¹³ Muhammad Suhail, *Tarikh al-Arab Qabla al-Islam* (Beirut: Dar al-Nafaes, 2009), 26.

Arab Musta'rabah yaitu Arab yang berasal dari kelompok Arab Adnaniyah.¹⁴

5. Utsmaniyah

Negara Islam yang dasar-dasar dari pemerintahannya menggunakan hukum Islam dan syari'at-syari'at Islam. Di kawasan Transoxiana terdapat komunitas kecil yang memiliki sebutan At-Turk atau Al-Atrak. Komunitas itu dipimpin oleh seorang yang bernama Sulaiman, mereka melakukan migrasi ke Barat sampai pada akhirnya ke wilayah Barat Laut Anatolia dan mendapatkan sebidang tanah di situ. Pemimpin selanjutnya diteruskan oleh anaknya yang bernama Erthugrul. Pada tahun 1258 M Erthugrul mempunyai anak bernama Utsman, singkat cerita Utsman menggantikan ayahnya dan mendirikan Daulah Utsmaniyah sesuai dengan namanya.¹⁵

G. Studi Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk menghindari plagiarisme dan untuk memungkinkan penulis membedakan karyanya dari penelitian-penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan studi terdahulu oleh penulis.

Pertama, Husen menulis tentang "Kegagalan Pengepungan Wina Habsburg 1683 M dan dampaknya bagi Turki Utsmani". Dalam penelitiannya, ia

¹⁴ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008),1.

¹⁵ Ramzi al-Munyawwi, *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*, terj. Muhammad Ihsan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012),28.

menggunakan teori dari para sejarawan seperti Shaw, yang berpendapat bahwa awal kemunduran Turki Utsmani terjadi pada tahun 1683 M. Metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis catatan dan peninggalan masa lalu. Poin-poin penting dijelaskan sesuai dengan bentuk, kejadian, suasana, dan masanya. Selain itu, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dan mencari hubungan yang mendukung data tentang peristiwa tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1683, Turki Utsmani mengalami kekalahan besar ketika Jenderal Kara Musthafa memimpin pasukannya menyerang Habsburg. Dalam kerajaan tersebut, terdapat dua tokoh yang mampu memengaruhi pasukan Kristen, yaitu John III Sobieski dan Paus Innocent IX. Hal ini mengakibatkan terbentuknya aliansi suci yang bertujuan untuk mengusir Turki Utsmani dari wilayah Eropa.¹⁶ Perbedaan dari penelitian penulis adalah letak temporal dan spasialnya, penelitian Husen ini berkisar pada tahun 1683 dan berfokus pada wilayah Balkan sedangkan persamaannya ialah sama-sama membahas penyebab kemunduran dari Khilafah Turki Utsmaniyah.

Kedua, Nurdianah dalam tulisannya yang berjudul "Peran Turki Utsmani di Aljazair dan Sekitarnya Abad ke-16" menggunakan teori solidaritas sosial. Menurut Durkheim, solidaritas adalah hubungan yang mengikat individu-individu dalam masyarakat berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan bersama. Teori solidaritas ini dibagi menjadi dua jenis: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi pada masyarakat atau kelompok sosial yang

¹⁶ Husen, Kegagalan Pengepungan Wina Habsburg 1683 dan Dampaknya Bagi Turki Utsmani (Jakarta: *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2018)

didasarkan pada kesadaran kolektif, kebersamaan, dan hukum yang bersifat menekan. Solidaritas organik terjadi pada masyarakat yang didasarkan pada ketergantungan antarindividu dan adanya spesialisasi pekerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis analitis, yang mencakup menceritakan sejarah secara kronologis sambil memberikan analisis terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Turki Utsmani berkontribusi signifikan dalam menyelamatkan umat Islam yang tertindas, terutama ketika mereka membantu mempertahankan wilayah Aljazair dari serangan kerajaan Kristen Spanyol. Pada masa itu, Spanyol sedang bangkit dan berhasil menghancurkan Dinasti An-Nasir di Spanyol pada tahun 1492 M dengan menguasai ibu kota Granada. Serangan ini dipimpin langsung oleh Paus sebagai bagian dari misi Reconquista.¹⁷ Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah fokus permasalahan, karena ini fokus pada peran Turki Utsmaniyah di wilayah Aljazair sedangkan persamaannya pada pengaruh Turki Utsmaniyah di wilayah Afrika Utara.

Ketiga, Pebri Sapitri, dalam penelitiannya yang berjudul "Perang Balkan dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial-Politik Islam di Eropa Tenggara (1876-1914)", menggunakan teori konflik. Ia mengambil pandangan Ralph Dahrendorf, yang mengemukakan bahwa masyarakat memiliki dua aspek, yaitu konflik dan konsensus. Menurut Dahrendorf, konflik berguna untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada pendapat Lewis Coser mengenai teori fungsionalisme konflik, yang menekankan

¹⁷ Nurdiyanah, Peran Turki Utsmani di Aljazair dan Sekitarnya Abad ke 16 (Jakarta: *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah*, 2015).

bagaimana fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada faktor spasial dan temporal, penelitian Pebri Sapitri ini berfokus pada wilayah Balkan atau Eropa Tenggara

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Trikoyo Lestari mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan Utsman bin Erthogrol, pendiri dinasti Turki Utsmani (700-724 H/1300-1324 M), menggunakan teori peran individu. Teori ini dikembangkan oleh Rustam E Tamburaka, yang menyatakan bahwa peran individu, baik itu orang atau kelompok, sangat penting dalam konteks pelaku peristiwa sejarah. Menurut Tamburaka, peran seseorang adalah hasil dari interaksi positif dirinya dengan lingkungannya, dan peran tersebut mencakup tindakan yang memiliki nilai dan normatif. Urgensi dalam teori ini adalah menggarisbawahi hubungan yang erat antara individu sebagai pelaku peristiwa sejarah dengan hasil dari tindakannya sebagai objek peristiwa sejarah.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang melibatkan proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengujian, analisis kritis, dan penafsiran terhadap peristiwa atau gagasan yang terjadi pada masa lampau. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Erthogrol melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Motivasi utamanya adalah untuk menguasai wilayah Bizantium yang berbatasan langsung dengan wilayah yang dikuasainya. Tindakan ini menyebabkan Bizantium merasa terancam dengan keberadaan Turki Utsmani yang semakin membesar dari waktu ke waktu. Kebijakan yang diterapkan oleh Erthogrol tidak hanya berdampak pada bangsa Turki, tetapi juga memengaruhi

dunia Islam dan dunia Barat secara keseluruhan.¹⁸ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak di fase temporalnya, penelitian ini berfokus pada tahapan awal pendirian negara Utsmaniyah sedangkan penelitian penulis pada fase menuju tahap akhir keruntuhan negara Utsmaniyah.

Kelima, Reyhan Biadillah, dalam penelitiannya yang berjudul "Kebijakan Ekonomi Turki Utsmani (1514-1574)", menggunakan kajian teori ekonomi. Teori ini dihubungkan dengan pandangan Adam Smith bahwa manusia berupaya memenuhi kebutuhan mereka, namun terbatas oleh sumber daya yang ada. Menurut Khaldun, teori ekonomi menyatakan bahwa negara berfungsi sebagai induk pasar yang menjamin kegiatan ekonomi rakyatnya dan mendukung keutuhan negara. Sementara teori Keynes menunjukkan bahwa dalam aktivitas ekonomi suatu negara, proses ekonomi dan penyelesaian masalahnya ditentukan oleh kebijakan dan peran pemerintah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang peristiwa masa lampau. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah meliputi lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemasukan keuangan Turki Utsmani berasal dari pajak, perdagangan, dan hasil penaklukan yang mereka peroleh, serta diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa. Perbedaan dari penelitian penulis adalah objek penelitiannya di sini fokus pada kebijakan pemimpin Turki

¹⁸ Trikoyo Lestari, *Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan Utsman bin Erthugrul Pendiri Dinasti Turki Utsmani (700-724 H/1300-1324 M)* (Yogyakarta: *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2008).

Utsmaniyah dalam mengelola ekonomi negara sedangkan penelitian penulis terletak pada gerakan separatisme Arab di wilayah Turki Utsmaniyah.

Keenam, Samsul Ahmad yang berjudul Peranan Muhammad Ali Pasha dalam Pengembangan Islam di Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penulisan sejarah. Proses pengambilan datanya dengan *Library Research* (Penelitian Pustaka). Kemudian penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan pendekatan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Ali Pasha, saat berhasil meraih posisi puncak di Mesir, melaksanakan sejumlah perombakan besar-besaran, terutama dalam bidang pendidikan. Dia mendirikan lembaga kementerian pendidikan yang bertujuan untuk mengatur pengadaan dan pengembangan berbagai fasilitas pendidikan. Lembaga pendidikan pertama yang didirikan oleh Muhammad Ali adalah sekolah militer pada tahun 1815 M, diikuti oleh pendirian sekolah teknik pada tahun 1816 M, serta sekolah kedokteran pada tahun 1818 M. Selanjutnya, dalam beberapa tahun berikutnya, dia mendirikan berbagai sekolah lainnya di berbagai bidang, seperti sekolah obat-obatan pada tahun 1829 M, sekolah pertambangan pada tahun 1834 M, dan sekolah pertanian serta sekolah penerjemahan pada tahun 1836 M. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammad Ali adalah seorang pemimpin Mesir yang berhasil mengarahkan negaranya menuju kemajuan peradaban yang lebih tinggi daripada negara-negara tetangganya.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada peran dari tokoh Muhammad

¹⁹ Samsul Ahmad, Peranan Muhammad Ali Pasha Dalam Pengembangan Islam di Mesir (Makassar: *UIN Alauddin*, 2018).

Ali Pasha, di penelitian ini Muhammad Ali Pasha sebagai tokoh pembaharu Mesir. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Muhammad Ali sebagai tokoh gerakan separatisme Mesir. Persamaannya terletak pada tokoh tunggal yang bernama Muhammad Ali Pasha sebagai penguasa Mesir dan sekaligus orang yang berpengaruh besar bagi sejarah Mesir modern.

Ketujuh, Ummi Nadhifah yang berjudul Dinasti Turki Utsmani di masa Pemerintahan Sultan Salim II (1566-1574 M). metode penelitiannya menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah dalam pengertiannya adalah penyelidikan suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historik. Pendekatannya menggunakan pendekatan politik. Dalam skripsi ini tidak ditemukan teori-teori yang dipakai.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sultan Salim II naik takhta karena menggunakan intrik politik dengan saudara-saudaranya, didukung langsung oleh ibu dan sebagian besar keluarga istana. Selama masa pemerintahannya, Sultan Salim II tidak seaktif ayahnya dalam menaklukkan wilayah baru, namun berhasil memperkuat posisi Kekaisaran Utsmaniyah di Tunisia. Meskipun menghadapi beberapa pemberontakan yang menghambatnya, Sultan Salim II tidak mampu mencapai prestasi sebesar para pendahulunya. Namun demikian, Sultan Salim II masih terlibat langsung dalam keputusan politik di Istanbul, memainkan peran penting di sana, dan masih banyak kebijakan yang

berasal langsung dari dirinya.²⁰ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada faktor temporalnya. Penelitian ini fokus pada berkisar tahun 1566 M dan letak persamaannya dengan penelitian penulis adalah berfokus pada Pemerintahan yang sama yaitu Turki Utsmaniyah.

H. Kerangka Konseptual

Penelitian tentang gerakan separatisme penguasa regional Arab di penghujung era Utsmaniyah pada tahun 1740-1920 M ini menggunakan pendekatan multidimensional yaitu pendekatan historis politik. Pendekatan ini digunakan karena berkaitan dengan sejarah yang kental akan politik kebijakan yang dilakukan oleh para penguasa lokal Arab untuk membangun kekuatan pribadi dan menginginkan otonomi daerah seluas-luasnya kepada atasannya yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Untuk itu alur penelitian sebagai kerangka konsep akan dilakukan dalam proses penelitian, peneliti perlu memaparkan objek material dan objek formal dalam penelitian ini.

a. Objek Material

Objek material yakni sesuatu yang realitas, ada, tampak oleh mata dan dapat diuji secara empiris. Dalam kajian ilmu filsafat, objek material merupakan objek yang diselidiki secara menyeluruh oleh filsafat, yaitu “ada” atau segala sesuatu yang bersifat material kongkrit, seperti manusia, benda, alam dan wujud lain.²¹ Objek material dalam penelitian

²⁰ Ummy Nadhifah, *Dinasti Turki Utsmani di Masa Pemerintahan Sultan Salim II (1566-1574 M)* (Jakarta: *UIN Syarif Hidayatullah*, 2019).

²¹ Win Usuluddin Bernadien, *Membuka Gerbang Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 26.

ini adalah gerakan separatisme yang terjadi di wilayah Turki Utsmaniyah pada tahun 1740-1849 M. Melihat kenyataannya bahwa gerakan separatisme ini adalah gerakan yang berbau politis yang menginginkan perpisahan secara pemerintahan dari Turki Utsmaniyah.

b. Objek Formal

Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui atau menganalisa objek material. Objek formal juga dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap objek material secara filosofis, ontologis, aksiologis dan epistemologis.²² Objek formal dalam penelitian ini digunakan untuk melihat atau merekonstruksi sejarah gerakan separatisme penguasa regional Arab seperti awal mula muncul, apa yang melatarbelakangi mereka muncul, bentuk dari gerakan separatisme nya bagaimana dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari gerakan tersebut

Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian ini merupakan penelitian bersifat sejarah. Menggunakan metode sejarah dengan pendekatan historis politik. Ilmu politik yang memang berfokus pada suatu pemerintahan dan dalam penelitian ini sangat sentral sekali dengan isu politik, bagaimana politik lah yang membuat para individu tokoh seperti Zahir al-Umar dan Muhammad Ali Pasha memiliki ambisi yang besar sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatisme yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar bagi Dunia Islam.

²² Win Usuluddin Bernadien, *Membuka Gerbang Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 29.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori ambisi politik yang dicetuskan oleh Joseph A. Schlesinger. Dia adalah seorang penulis dan ilmuwan politik yang berkontribusi dalam memahami ambisi politik dan perilaku politik para pemimpin. Dia mengatakan dalam teori ambisi politiknya bahwa para pemimpin politik cenderung memiliki ambisi yang kuat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan ambisi ini mempengaruhi perilaku politik mereka. Tidak hanya tentang memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya tapi dalam teori ini mencakup identitas politik, aspirasi pribadi dan dorongan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi.

Ambisi politik banyak dipengaruhi berbagai faktor seperti pengakuan, keinginan untuk mencapai prestise atau juga untuk mendapatkan kekayaan pribadi. Teori ambisi politik Schlesinger juga menyoroti bahwa ambisi politik dapat menjadi pendorong utama dalam pembuatan keputusan politik. Para pemimpin biasanya ketika memutuskan sesuatu, membuat sesuatu dan strategi politik melibatkan ambisi mereka untuk memperkuat dan mempertahankan posisi kekuasaan mereka atau mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Lalu penulis mengira penggunaan analisis teori ambisi politik dapat membantu memahami motivasi individu seorang pemimpin politik di balik gerakan-gerakan separatis yang dimobilisasinya.²³ Dalam teori ini juga terkandung beberapa elemen seperti kebutuhan afiliasi, karakteristik inividu, motivasi personal dan juga konteks politik.

²³ Joseph A. Schlesinger, *Ambition and Politics: Political Careers in the United States* (Amerika: Rand McNally, 1966),30.

Teori selanjutnya yang digunakan penulis adalah teori pilihan rasional James S. Coleman. Menurut Coleman, teori ini mengacu pada tindakan individu yang berorientasi pada suatu tujuan, di mana tujuan tersebut ditentukan oleh nilai atau preferensi pilihan. Coleman juga menyatakan bahwa untuk keperluan teoretis, diperlukan konsep yang lebih akurat mengenai aktor rasional, yang berasal dari ilmu ekonomi dan menggambarkan aktor sebagai pihak yang memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Individu membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi mereka untuk mencapai manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri.

Teori pilihan rasional tidak memperhatikan apa yang menjadi pilihan atau sumber pilihan aktor; yang penting adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan preferensi aktor. Teori Coleman memiliki dua unsur utama, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah faktor yang menarik perhatian dan dapat dikendalikan oleh actor

Jadi penulis berusaha mengaitkan antara teori ambisi politik dengan teori pilihan rasional yang korelasinya dengan penelitian ini adalah menganalisa bagaimana penguasa regional Arab memiliki ambisi dalam berpolitik dan ketika ambisi itu dalam prosesnya banyak memunculkan pilihan-pilihan rasional yang menguntungkan bagi penguasa regional tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Data yang diambil dari sumber tertulis berupa buku, artikel, jurnal, surat hasil konvensi Inggris, dan

sumber-sumber tulis lainnya. Metode penelitian sejarah ini bertumpu pada empat tahapan penelitian yang meliputi :

1. Heuristik

Menurut M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, mereka merujuk pada teori heuristic yang diperkenalkan oleh GJ Garraghan, yang menyatakan bahwa Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristiken yang artinya menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber. Dalam konteks sejarah, sumber-sumber merujuk pada catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa yang terkait dengan kehidupan manusia. Bahan-bahan tersebut kemudian digunakan sebagai alat dalam penulisan sejarah, bukan sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki data terlebih dahulu sebelum memulai penulisan sejarah. Kajian tentang sumber-sumber ini disebut sebagai ilmu heuristik. Dalam istilah lain, heuristic merupakan teknik atau seni, bukan ilmu. Heuristik tidak memiliki peraturan umum dan memiliki sedikit pengetahuan tentang kegiatan yang singkat.

Umumnya, ini melibatkan keterampilan dalam menangani buku-buku penuntun khusus, memiliki ingatan kuat untuk rincian bibliografi, serta memiliki disiplin sendiri dalam melakukan, mengklasifikasi, dan merawat catatan-catatan.

Dengan menggunakan studi pustaka, di sini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data tertulis yang terdapat di dalam perpustakaan maupun browsing literature di

internet yang berkaitan dengan sejarah Gerakan separatism penguasa regional Arab pada penghujung era Utsmaniyah.

Dalam tahap ini penulis melakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember, dari buku pribadi yang dibeli melalui toko buku, dari e-book yang diakses melalui internet, data-data asli peninggalan pelaku sejarah era Utsmaniyah melalui internet, untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi pengelompokan sumber-sumber yang telah diperoleh.

2. Verifikasi Sumber

Peneliti melakukan verifikasi terhadap sumber secara eksternal dan internal dengan maksud memastikan bahwa data yang digunakan valid dan relevan. Setelah peneliti menetapkan dengan pasti topik sejarah yang akan diteliti dan telah mengumpulkan sumber-sumber tulisan, langkah selanjutnya adalah verifikasi, juga dikenal sebagai kritik sejarah atau validitas sumber. Verifikasi terdiri dari dua aspek, yaitu autentisitas atau keaslian sumber, yang merupakan kritik eksternal, dan kredibilitas atau kepercayaan yang dapat dipercayai, yang merupakan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan untuk menilai sejauh mana keaslian sumber, sedangkan kritik internal bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan atau kredibilitas sumber, termasuk kompetensinya, keterlibatan atau kehadiran dalam peristiwa sejarah, serta kepentingan dan subjektivitas sumber, serta

ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran dan konsistensi sumber terhadap isi atau konten.

Dalam tahap kritik sumber dan verifikasi ini penulis membaca, menulis dan mempelajari dan menelaah secara cermat sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan sejarah gerakan separatism para penguasa Arab di dalam pemerintahan Utsmaniyah. Kemudian penulis mencoba membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, guna menemukan kebenaran yang akurat dan dapat dipercaya.

3. Interpretasi

Interpretasi sejarah, yang juga dikenal sebagai analisis sejarah, merupakan proses menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dengan tujuan melakukan sintesis atasnya. Kemudian, bersama dengan teori-teori yang relevan, fakta-fakta tersebut disusun ke dalam satu interpretasi yang komprehensif. Hasil penafsiran berusaha mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh sehingga membentuk kronologi sejarah yang logis. Pada tahap ini, penulis menghubungkan berbagai fakta sejarah dari berbagai referensi yang tersedia. Setelah itu, dilakukan analisis dengan membandingkan dengan referensi lain yang relevan terkait fakta sejarah yang ditemukan, sehingga menghasilkan tulisan sejarah yang kronologis dan tersusun sesuai dengan penelaahan waktu peristiwa sejarah tersebut.

4. Historiografi

Peneliti menggunakan historiografi sebagai proses intelektual utama untuk memahami sejarah. Dalam metodologi sejarah secara umum, penulisan sejarah dianggap sebagai tahap terakhir dari serangkaian langkah yang biasanya dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah melibatkan penulisan, penyajian, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Dengan kata lain, historiografi merupakan tahap penutup dari penelitian sejarah, yang dilakukan setelah melalui fase-fase heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Pada tahap ini, penekanan diberikan pada hasil-hasil dari ketiga tahap sebelumnya, dengan cara mengungkapkan dan menjelaskan sumber-sumber sejarah yang ditemukan dalam bentuk tulisan, yang disajikan sebagai narasi atau cerita sejarah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun karya Ilmiah dalam penyajian diperlukan sistematika yang mapan, karena dengan demikian akan mempermudah dalam memahami isi seluruh rangkain penulisan itu sendiri demikian halnya dengan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan dibagi dalam 4 Bab utama dengan beberapa sub Bab yang mempunyai keterkaitan dengan bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I dimulai dari pendahuluan yang menggambarkan secara global dari keseluruhan isi skripsi ini, yang terdiri dari : Latar Belakang, Fokus Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II penulis memaparkan bagaimana awal mula terbentuknya kekuatan-kekuatan regional tanah Arab dalam tubuh pemerintahan Utsmaniyah sehingga mempunyai potensi untuk melakukan pemberontakan. Lalu menggambarkan masyarakat muslim di tanah Arab pada tahun 1700 awal yang masih dalam pemerintahan Utsmaniyah baik dari segi politik, ekonomi, sosial, militer dan keagamaan. Kondisi tersebut perlu dijelaskan untuk mengetahui kondisi masyarakat Arab pada umumnya. Jadi bab ini merupakan penjelasan mengenai kondisi masyarakat Arab dan awal mula terbentuknya pemerintahan lokal yang independen.

Bab III penulis menguraikan bagaimana cara para penguasa regional Arab mengelola pemerintahannya sehingga mempunyai kekuatan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan resmi Utsmaniyah

Bab IV penulis menjabarkan apa saja dampak yang ditimbulkan ketika adanya kemunculan para gerakan separatis yang selalu menginginkan dan mewujudkan otonomi khusus yang seluas-luasnya.

Bab V berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan melalui penelitian dalam skripsi ini.

BAB II

LATAR BELAKANG MUNCULNYA GERAKAN SEPARATISME

A. Pemerintahan Utsmaniyah abad ke-18

Utsmaniyah pada tahun 1700 Masehi awal masih memiliki luas wilayah yang begitu membentang dari sebagian Eropa Tenggara, perbatasan Irak di timur, wilayah sebagian Yaman di Selatan dan Aljazair paling pojok dari arah barat daya kekuasaan Imperium Utsmaniyah. Dunia muslim saat itu juga masih sebagian besar terintegrasi ke dalam tiga imperium besar, yakni Imperium Utsmaniyah, Mughal dan Shafawiyah. Seluruh negara dan bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi kesehariannya termasuk dalam wilayah kekuasaan Imperium Utsmaniyah, dengan ibukotanya Istanbul, kecuali sebagian wilayah Arabia, Sudan dan Maroko. Bahasa Turki adalah bahasa resmi keluarga istana, militer, dan elite pemerintahan. Sebagian besar mereka adalah pendatang dari wilayah Balkan dan Kaukasus. Elite hukum dan agama berasal dari keturunan campuran. Mereka dilatih di sekolah-sekolah istana Istanbul, yang di dalamnya sejumlah literatur dan kitab-kitab hukum ditulis dengan menggunakan bahasa Arab.

Imperium Utsmaniyah merupakan sebuah negara birokrasi sendiri yang juga mengklaim sebagai otoritas yang didasarkan pada perlindungan atas agama. memegang kendali atas daerah yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam sebuah sistem pemerintahan dan fiskal tunggal. Namun imperium ini juga merupakan cerminan terakhir dari keuniversalan

Dunia Islam. Ia memelihara hukum agama, melindungi dan memperluas perbatasan dunia Muslim, menjaga kota suci Arab yakni Makkah dan Madinah, serta mengorganisasikan umat muslim yang hendak melakukan perjalanan haji ke tanah suci. Imperium ini juga menganut sistem multi-agama yaitu dengan memberikan pengakuan kepada umat Kristen dan Yahudi. Penduduk Muslim di kota-kota provinsi direkrut ke dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, di negeri-negeri Arab berkembang kebudayaan Utsmaniyah Arab, yang memelihara dan secara kreatif mengembangkan warisan budayanya. Pada abad ke-16 sistem perpajakan Utsmaniyah terbiasa menggunakan catatan. Daftar pembayar pajak yang terinci disusun dengan berisikan data warga negara dan pendapatan kena pajak untuk setiap desa di setiap provinsi, daftar seperti ini biasanya diperbaharui setiap tiga puluh tahun sekali namun sayangnya pada abad ke-18 praktik semacam ini sudah benar-benar tiada.¹

Pada abad ke-18 Masehi awal, perimbangan kekuasaan antara pemerintah Utsmaniyah pusat dengan pemerintahan lokal telah berubah. Di beberapa bagian imperium, pejabat atau keluarga ataupun juga kelompok Utsmaniyah lokal yang berkuasa memiliki otonomi relatif. Akan tetapi beberapa bagian dari mereka masih memiliki kelayakan kepada kepentingan-kepentingan kebutuhan utama imperium Utsmaniyah. Juga terjadi perubahan pola hubungan antara negara-negara Eropa dan pemerintahan Utsmaniyah. Sementara imperium ini telah melakukan ekspansi kekuasaannya sampai ke

¹ Bruce Masters, *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo 1600-1750* (New York: New York University Press, 1988).

kawasan Eropa pada abad-abad awal pemerintahan, lalu menjelang paruh kedua abad ke-18 M sebagian besar daerah tersebut berada di bawah ancaman militer Eropa Barat dan Utara. Terjadi pula pola perubahan sifat dan arah perdagangan, seiring dengan menguatnya pertumbuhan pemerintahan dan perdagangan Eropa di Samudra India dan Lautan Mediterania. Menjelang akhir abad ini, para elite penguasa politik Utsmaniyah mulai sadar akan kemerosotan negerinya dan keutuhan keamanan negerinya. Mereka mulai banyak mengalami kekalahan dalam mempertahankan wilayahnya dan cenderung hanya focus mempertahankan wilayah dan tidak lagi memperlebar wilayahnya khususnya di wilayah Balkan atau Eropa Tenggara.

Provinsi daerah Utsmaniyah yang ada di Arab pada bagian wilayah Aleppo, Damaskus dan daerah pesisir Tripoli, dibagi menjadi unit administrative yang relative lebih kecil dan biasanya ditempatkan di bawah komandan militer. Gubernur provinsi mendapatkan wilayah yang begitu luas dengan sejumlah tentara dan bagian perpajakan tetap diserahkan kepada Sultan untuk mendukung ekspedisi perang dan perbendaharaannya. Komandan militer mendapatkan bagian wilayah terluas kedua setelah gubernur provinsi, lalu disusul komandan dengan pangkat yang lebih rendah mendapatkan tanah yang ukurannya proporsional dengan jabatannya dan pasukannya diikutsertakan pada ekspedisi militer Sultan.²

Penelitian ini fokus meneliti tahun-tahun abad ke-18 M sampai dengan abad ke-19 awal dalam pemerintahan Utsmaniyah khususnya di tanah-tanah Arab yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan Utsmaniyah

² Henri Laoust, *Les Gouverneurs de Damas* (Damaskus: de Institut Francais de Damas, 1932), 151.

sejak tahun 1516 semenjak ekspansi yang menakutkan bagi orang-orang Mamluk saat itu karena memang dunia Arab saat itu masih dalam genggamannya kekuasaan Mamluk yang berpusat di Kairo. Kembali lagi kepada pembahasan awal, semenjak penaklukan Eropa Timur atau Eropa Tenggara atau juga dapat dibidang Semenanjung Balkan yang di mulai pada era-era awal Utsmaniyah terlebih lagi masa Sultan Murad I 1362-1389, pemerintahan ini berhasil mempertahankan sebagian besar wilayah Balkan sampai pada abad ke-17 M. memasuki tahun-tahun 1650-an Utsmaniyah lebih fokus untuk bagaimana caranya mempertahankan wilayahnya yang begitu luas. Sama halnya dengan pemerintahan-pemerintahan Islam sebelumnya dan pemerintahan di berbagai macam belahan dunia pada umumnya fase jatuh bangun, kemajuan-kemunduran pencapaian akan selalu dialaminya.

Ada dua hal yang perlu dijadikan catatan. *Pertama*, adanya kelemahan dari dinasti itu sendiri. *Kedua*, adanya akumulasi kekuatan dari para pesaing dan penantangannya. Para pengamat kontemporer cenderung memberikan penekanan kepada bagian kelemahan internalnya suatu pemerintahan, terutama kemerosotan moral dibandingkan dengan adanya akumulasi kekuatan para pesaing suatu pemerintahan tersebut. Orang-orang yang menempati di pemerintah Arab ditunjuk pemerintah pusat Istanbul dan cenderung berasal dari luar Arab. Anak-anak laki-laki Kristen yang berasal dari wilayah Balkan diambil dari desa-desa untuk melakukan wajib militer ala Utsmaniyah *Devshirme* atau “retribusi anak laki-laki” mereka dikirim ke Istanbul

lalu dipaksa memeluk agama Islam dan dilatih untuk mengabdikan kepada Sultan. Anak laki-laki yang kuat secara fisik dilatih dan ditempa untuk menjadikannya sebagai Yeniceri. Sedangkan anak-anak yang cerdas dikirim ke istana untuk dilatih menjadi pegawai negeri di dalam istana atau di jajaran birokrasi.³

Tidak berapa lama, penguasa berhenti memelihara syariat, yakni dasar bagi kemakmuran kota serta mempererat kebersamaan antara penguasa dan penduduk kota. Sebagian orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi terperangkap oleh hasrat kemewahan dan pemborosan yang merugikan dan membebani rakyat. Manakala permintaan penguasa melampaui kemampuan rakyatnya, maka hal itu bukan sekedar meningkatnya pemborosan istana, itu juga mungkin karena keterbatasan kapasitas produksi masyarakat. Agar suatu pemerintahan stabil, daerah pedesaan di bawah kendalinya perlu memproduksi kebutuhan pangan yang memadai guna memenuhi kebutuhan penduduk desa dan kota, di samping menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan manufaktur. Mereka yang bercocok tanam, menggembala ternak, dan membuat barang-barang kebutuhan juga perlu mendapatkan hasil yang surplus yang cukup lewat pajak tentunya guna memenuhi kebutuhan istana, pemerintah dan tentara. Sukses atau tidaknya hal ini bergantung pada banyak faktor-faktor yang sebagian dapat saja berubah. Pergantian metode dapat terjadi dalam hal teknik produksi. Baik berupa peningkatan teknis, yakni dengan diperkenalkannya tanaman baru atau metode irigasi, yang dapat membantu naiknya produksi dan surplus

³ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah*, terj. Fahmi Yamani (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 36.

ataupun sebaliknya yaitu hilangnya kecakapan teknik yang dapat berakibat penurunan produksi.⁴

Perubahan-perubahan yang tidak menentu dan cenderung susah untuk ditebak mulai dari segi perekonomian pemerintahan Utsmaniyah seperti permintaan-permintaan produk lokal dari negara-negara lain dapat meningkat dan menurun, pergantian dalam pola perdagangan yang di terapkan, biaya transportasi dan keamanan perjalanan baik darat maupun laut akan memengaruhi kemampuan pemerintahan untuk memenuhi permintaan tersebut. Besaran surplus pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan penanaman modal dalam produksi yakni dengan cara pembuatan lahan baru atau penemuan menggunakan metode baru dalam penanaman. Begitupun juga dengan segi kelangsungan kesehatan masyarakat, angka kelahiran dan kematian pun dapat bertambah atau berkurang hal itu dapat saja karena faktor perubahan dalam bidang ilmu kedokteran atau karena moral dan pola hidup masyarakat itu sendiri.

Ada juga peristiwa-peristiwa mendadak yang susah untuk dihindari yang akan memengaruhi komoditas produksi dalam suatu wilayah tertentu seperti peperangan dan penyakit wabah yang menular. Adanya peperangan dalam suatu wilayah akan berdampak terganggunya rute perdagangan, pembumihangusan kota, pembakaran desa-desa, fakta bahwa orang-orang Arab yang mayoritas muslim merdeka dikecualikan dalam perekrutan tentara dan itu

⁴ Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim* (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 405-406.

artinya orang asli Arab sangat jarang terdapat di kalangan elit politik Utsmaniyah.⁵ Sementara itu wabah penyakit yang menular dapat membunuh sebagian besar populasi masyarakat daerah tersebut. Pada masa ketika penyakit wabah itu dapat dikontrol, dan bahkan benar-benar menghilang sulit bagi pemerintah untuk memahami dampak tiba-tiba dan menghancurkan dari wabah penyakit khususnya yang terbesar pada abad ini yakni wabah penyakit pes. Wabah yang dibawa oleh binatang tikus hitam ini berasal dari endemis bagi wabah tersebut seperti di Irak Utara dan sebagian India. Dari situ wabah penyakit ini akan menyebar dengan sangat massif di kota-kota dan desa-desa, membunuh sebagian besar penduduk dan hewan ternak mereka.

Proses-proses yang demikian ini saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya, dan sebagian proses itu menjadi penyebab dari proses yang lain. Proses-proses tersebut menjelaskan perubahan hubungan antara tuntutan pemegang kekuasaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi tuntutan tersebut, serta munculnya tantangan dari para pemimpin dan kelompok yang sanggup meraih kekuasaan dan menggunakannya untuk memperluas rentang kendali atas sumber-sumber daya. Suatu perubahan dapat saja terjadi dalam sistem pemerintahan yang ada seperti yang dalam hal ini para tentara dapat merebut kendali efektif dari para penguasa. Seorang pemimpin akan mengerahkan sumber daya manusia di padang rumput atau pegunungan melalui daya tarik pribadi atau menggunakan unsur-unsur agama. Apakah

⁵ Salmon, *Account of the Ottoman Conquest* (England: Forgotten Books, 2018), 72.

perebutan kekuasaan datang dari dalam atau luar, biasanya motif kekuasaan akan datang dari pihak tentara yang direkrut dari wilayah luar pusat negara baik dari pegunungan, padang rumput, padang pasir ataupun dari seberang perbatasan. Tentara yang demikian biasanya sangat tangguh dalam menggunakan senjata maupun kuda, yang sudah biasa digunakan dalam peperangan pada masa itu.

Seorang pemimpin yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan lebih condong suka merekrut prajurit-prajurit dari luar daerah yang hendak dikuasai, atau setidaknya dari daerah yang jauh, karena disitulah akan terjalin kepentingan masing-masing dari mereka. Namun ketika penguasanya sudah mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan, maka para prajuritnya biasanya akan kehilangan kohesinya dan menimbulkan kepentingan-kepentingan baru yang berbeda dengan kepentingan pemerintahan yang baru dibentuk. Sang penguasa pun mungkin mencoba menggantikan mereka dengan prajurit bayaran yang baru dan pengawal istana pribadi dengan menggunakan uang pribadinya. Untuk urusan inipun sang penguasa akan merekrut prajurit dari wilayah yang berbeda dan jauh.

Abad ke-18 sebagaimana yang sudah dituliskan di atas tadi bahwa itu adalah fase kemunduran dari pemerintahan Utsmaniyah, yang paling mencolok dari performa kemunduran Utsmaniyah di tanah Balkan adalah seringnya pemerintah Utsmaniyah mengalami kekalahan dalam suatu peperangan baik perang menginvasi daerah baru dan lebih-lebih lagi mempertahankan daerah lama dia yang sudah dikuasainya. Sebut saja pada

tahun 1718 Turki Utsmani mengalami kekalahan oleh kerajaan Habsburg yang kini letaknya di negara Austria. Dengan kekalahan itu maka pemerintahan Turki Utsmani terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian *Treaty of Passarowitz*. Walaupun demikian ada kabar bagus di sebelah Timur kekuasaan, Turki Utsmani memperoleh kemenangan atas kerajaan Shafawiyah sehingga dengan kemenangan itu kekuasaan Turki Utsmani bercokol dan memperkokoh posisi di daerah Azerbaijan, Hamadan dan Tabriz.⁶

Dalam sistem pemerintahan Utsmaniyah, birokrasi terbagi menjadi dua. *Pertama*, para sekretaris yang mempersiapkan secara rapi dokumen-dokumen perintah atasan, peraturan dan tanggapan terhadap suatu petisi serta memeliharanya. *Kedua*, para petugas yang menjaga keuangan, penilaian terhadap asset yang terkena pajak serta catatan mengenai beberapa besar jumlah pajak yang terkumpul dan bagaimana penggunaannya, lalu kesemuanya itu membentuk suatu arsip yang sangat bernilai dalam dunia Islam dan memiliki arti penting dalam kacamata sejarah dunia.

Pada beberapa kasus kadang kala pajak tidak dapat terkumpul dan masuk ke kas pemerintah maka biasanya pemerintah akan melakukan kerjasama dengan *reaya* atau penduduk sipil yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Penguasa melihat bahwa *reaya* bukanlah suatu sekumpulan individu melainkan sebagai sejumlah kelompok atau dalam

⁶ Abu Hanifah Haris, Sejarah Kerajaan Turki Utsmaniyah dan Sumbangannya dalam Bidang Sosio-Politik (*Journal of Al-Tamaddun*, Vol. 15, No. 1, 2020) 93.

bahasa Turkiya *taife* atau dapat juga *cemaat*. Jika pemerintah hendak berurusan dengan kelompok rakyat tertentu untuk tujuan perpajakan atau urusan pelayanan pemerintah lainnya maka kelompok rakyat tersebut dianggap sebagai sebuah unit, dan salah satu anggotanya diangkat sebagai penengah antara pemerintah dan rakyat tersebut. Tujuannya untuk dapat menjadi penghubung antar pemerintah dan rakyat. Lalu biasanya sang penengah ini adalah seseorang yang diakui dan dapat diterima di kalangannya dan juga pemerintah. Biasanya dia mempunyai kedudukan moral tertentu baik dalam menyampaikan perintah dan tuntutan pemerintah dalam kelompoknya, maupun sekaligus mengungkapkan keluhan kesah dan permohonan kelompok kepada pemerintah. Ia membantu memelihara perdamaian dan tatanan dalam kelompoknya dan menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase sebelum pada titik yang menuntut campur tangan pemerintah.

Berbagai macam komunitas Yahudi dan Kristen memiliki kedudukan khusus, karena mereka membayar pajak lalu memiliki sistem hukum tersendiri, dan tentunya pemerintah Utsmaniyah harus dapat memastikan kesetiaan mereka. Di provinsi dan ibu kota pemerintahan biasanya mengakui bahwa seorang pemuka agama memiliki yurisdiksi hukum tertentu dan bertanggung jawab untuk memelihara tatanan yang ada dan sekaligus mengumpulkan jizyah. Dengan metode seperti ini maka pihak non-Muslim terintegrasi ke dalam penduduk pada umumnya. Mereka tidak secara penuh termasuk ke dalamnya, namun memungkinkan bagi perorangan untuk dapat

menjadi orang berkuasa dan mempunyai pengaruh. Selanjutnya kaum Yahudi pada abad ke-17 memiliki kedudukan yang penting dalam urusan pelayanan keuangan, lalu satu abad kemudian disusul dengan orang-orang Yunani mempunyai peranan penting dalam sumbangsih keberpengaruhan untuk pemerintah yaitu menjadi pihak kepala penerjemah di kantor menteri besar dan menjadi gubernur di dua provinsi Rumania, Moldova dan Walles.

Masyarakat non-Muslim bagaimanapun juga, mereka tidak tampak hidup dalam keterkucilan atau dalam bawah tekanan. Mereka termasuk ke dalam masyarakat pengrajin dan pedagang, sedangkan masalah ibadah mereka memiliki kebebasan dalam mempraktekannya tetapi tetap dalam batasan. Struktur sosial masyarakat Utsmaniyah digambarkan sebagai masyarakat yang sangat menghormati sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sultan mendelegasikan kekuasaannya kepada individu yang dianggap layak berdasarkan penilaiannya. Mereka yang dipercaya oleh sultan kemudian memiliki wewenang untuk merekrut tentara, menguasai provinsi, mengatur keadilan, dan memungut pajak. Sebagai kompensasi, mereka dibebaskan dari pajak, menerima seragam khusus, diizinkan membawa senjata, dan memiliki akses khusus di bidang pendidikan dan hukum.⁷

Pada masa pemerintahan Utsmaniyah, pengurangan bahkan pembebasan *jizyah* diperluas menurut kepentingan dan pertimbangan pemerintah seperti *Ahl dzimmi* mereka yang mendiami wilayah di perbatasan dan wilayah-wilayah benteng pertahanan, mereka yang mempunyai tugas

⁷ M Jannah, Runtuhnya Turki Utsmani 03 Maret 1924 (*Journal of History*, Vol. 1, No.1, 2019) 152

sebagai penunjuk jalan bagi pasukan-pasukan yang melakukan ekspedisi, mereka yang memasok sulfur untuk pabrik mesiu yang terdapat di Salonika (termasuk dalam pabrik pemasok persenjataan senjata api), serdadu-serdadu Kristen yang membentuk korps tersendiri dalam pasukan Turki, yang disebut *voynuks*.⁸

B. Kondisi Masyarakat Arab Utsmaniyah abad ke-18

Studi mengenai sejarah provinsi-provinsi pemerintahan yang berbasis di wilayah Arab banyak sifat kesamaan antara wilayah-wilayah tersebut dengan wilayah Anatolia dan Eropa Tenggara. Terlihat bahwa jumlah penduduk dan kemakmurannya pada periode setelah penaklukan yang dilakukan oleh Turki Utsmani itu mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan oleh keamanan dan kemakmuran yang diciptakan oleh imperium yang semakin membaik namun setelah itu jumlahnya mengalami stagnasi dan bahkan sedikit menurun. Provinsi-provinsi bagian Arab adalah wilayah yang terluas dari keberhasilan Turki Utsmani menguasai wilayah-wilayahnya. Populasi masyarakat Kairo pada pertengahan abad ke-17 meningkat sekitar 250.000 dan pada awal abad ke-18 meningkat menjadi 300.000 orang. Pada waktu yang sama di wilayah Suriah Aleppo kota itu berpenghuni sekitar 100.000 jiwa, Damaskus dan Tunisia kemungkinan memiliki populasi yang sedikit lebih rendah, namun memiliki besaran yang sama. Baghdad tidak pernah mengalami kemajuan akibat kemerosotan sistem irigasi Irak Selatan, invasi Mongol dan pergerakan perdagangan dari jalur Samudra India sampai

⁸ M Nur Ilham Achdar, *Pemikiran dan Praktek Akuntansi di Masa Turki Utsmani (Journal of History, Vol. 3, No. 2, 2023)* 11

Laut Merah. Sementara itu wilayah Aljir yang termasuk bagian dari Afrika Utara yang dapat dibilang cukup kuat dikala itu karena mampu menghadapi orang-orang Spanyol. Provinsi ini berpenduduk sekitar 100.000 jiwa pada abad ke-18 awal M.

Para gubernur-gubernur Utsmaniyah dan para komandan militernya mempunyai inisiatif untuk menciptakan kegiatan pekerjaan-pekerjaan umum di pusat-pusat kota. Maka dibangunlah masjid-masjid dan sekolah-sekolah, lalu berikutnya ada gedung-gedung komersil yang hasilnya akan digunakan untuk. Sebagai contoh, Yayasan Duqakin zade Mehmet Pasha di Aleppo. Ada lagi Takiyya di Damaskus, sebuah kompleks masjid, sekolah dan penginapan untuk para jamaah haji yang dibangun ketika masa Sultan Sulaiman yang Agung. Setelah pemerintahan Utsmaniyah mengakar di wilayah provinsi-provinsi besar, di sana berkembanglah kelompok-kelompok penguasa lokal Utsmaniyah. Di provinsi-provinsi yang berada langsung di bawah kendali Utsmaniyah, gubernur dan *qadhi* ditunjuk secara langsung oleh pemerintahan pusat Istanbul dan diganti secara berkala⁹

Para pejabat arsip setempat cenderung diambil dari kalangan-kalangan keluarga istana yang menetap di beberapa kota provinsi dan yang mewariskan keahlian khusus mereka turun temurun. Para gubernur dan komandan angkatan bersenjata jika mereka menetap lama di kota maka mereka dapat menciptakan rumah tangga tersendiri bagi para *mamluk* dan memberikan mereka kedudukan penting. Kelompok-kelompok lokal ini akan

⁹ Hasan Asari MA, Sejarah Islam Modern (Medan : Perdana Publishing, 2019), 20

menjalin persekutuan dengan para pedagang dan ulama. Orang-orang kaya kota terdiri dari para banker, penukar uang serta para pedagang pendatang. Para pedagang asing yang berasal dari Eropa, Kristen ataupun Yahudi memang belakangan ini semakin banyak namun perdagangan terpenting dan yang paling memberikan keuntungan antara berbagai pihak pemerintah atau dengan negeri-negeri di Samudera Hindia, tetap berada pada tangan pedagang Muslim. Mereka memegang perdagangan kopi di Kairo yang menyertai perjalanan jamaah haji ke Makkah dan mengontrol rute-rute kafilah yang melintasi Suriah dan padang pasir Sahara.

Di Mesir sekitar abad ke-18, ulama dalam pengertian umum termasuk mereka yang menjalankan fungsi-fungsi di dalam hukum, pendidikan dan ibadah, di perkirakan berjumlah 4000 orang. Ulama di kota-kota Arab memiliki karakter yang berbeda dengan ulama yang mendiami wilayah Istanbul. Ulama yang berada di Istanbul beberapa menjadi mesin pemerintahan, dilatih di sekolah-sekolah pemerintah, ditunjuk untuk dinas pemerintah dan berharap menginginkan kedudukan yang tinggi di dalamnya. Kemudian jika ulama yang berada di wilayah Arab merupakan penduduk lokal asli setempat, mereka banyak berasal dari masa-masa Mamluk atau dapat jadi lebih awal lagi dan sebagian lagi mengaku sebagai keturunan Nabi atau dapat disebut *Sayyid*. Mereka bersekolah di wilayah-wilayah yang menyesuaikan mereka seperti di Kairo Al-Azhar, Zaitunah di Tunisia, dan sekolah-sekolah di Damaskus Aleppo yang mewarisi tradisi kebudayaan dan bahasa yang jauh mengakar sebelum kedatangan Dinasti Utsmaniyah.

Masyarakat Arab sejak zaman dahulu sebelum kedatangan Islam mempunyai superioritas yang tinggi dalam kedudukan kaum laki-laki. Seorang laki-laki akan selalu tetap menjadi pemimpin keluarganya yang tidak boleh dibantah dan perkataannya harus selalu dituruti.¹⁰ Dan kaum Arab hingga abad ke-20 masih mempertahankan kekokohan kedudukan kaum laki-laki sampai terjadinya penyebaran ideologi-ideologi feminisme dari wilayah Eropa. Pada abad ke-18 pengaruh kekuasaan dan budaya Turki Utsmani terhadap provinsi-provinsi Arab tampak semakin dalam. Pengaruh tersebut berakar di kota-kota melalui perantara kelompok dan keluarga Turki Utsmani setempat. Para keluarga penguasa lokal dan kelompok Mamluk merupakan sebuah fenomena para petinggi pada tingkatan yang lain

Pada abad ke-17 M ada suatu hal yang baru dari pemerintahan Utsmaniyah, ini adalah pengaruh baru yang datang dari Dunia Islam Timur. Tarekat Naqsyabandiyah hadir di Istanbul dan di beberapa lokasi lainnya sejak periode awal. Seorang guru sufi dari Samarkand, yang telah belajar di India datang dan menetap di Istanbul lalu di Damaskus serta membawa ajaran Naqsyabandiyah baru yang telah dikembangkan oleh Ahmad-Shirhindi di India Utara pada permulaan abad tersebut. Dia memperoleh keramah tamahan sultan dan bermukim di Damaskus. Di kota-kota besar Arab tradisi literer tetap berlanjut, puisi dan karya-karya tentang sastra tidak sebanyak cerita lokal, biografi, dan himpunan karya di bidang fiqh dan hadits. Di

¹⁰ Shafiyurrahman al-mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 33

bawah pemerintahan Utsmaniyah ruang bagi bahasa Arab tidak dikurangi bahkan lebih diperkuat. Ilmu-ilmu agama dan hukum diajarkan dalam bahasa Arab di sekolah-sekolah di Istanbul yang sama besarnya dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Damaskus dan Mesir. Para penulis Utsmani yang mengarang buku-buku jenis tertentu cenderung menulis dalam bahasa Arab. Puisi dan karya-karya sekuler ditulis dalam bahasa Turki Utsmani yang berkembang pada masa ini sebagai sebuah kebudayaan yang tinggi.

C. Munculnya Penguasa Otonom Arab (1740 M)

Istilah separatisme mengacu pada upaya individu, kelompok, atau komunitas yang ingin memisahkan diri atau keluar dari sebuah kesatuan besar dengan tujuan untuk menjadi entitas negara atau bangsa yang merdeka. Tujuan utama pemisahan tersebut dalam literatur hukum internasional adalah untuk menjadi negara yang merdeka, terlepas dari negara induknya. Namun, dalam beberapa situasi, pemisahan diri juga dapat menjadi salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Selain itu, tujuan lain dari pemberontakan mungkin termasuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan baru yang diinginkan oleh pemberontak, bergabung dengan negara lain (integrasi), atau memperjuangkan otonomi yang lebih luas.¹¹

Apapun maksud dan tujuan kaum pemberontak, termasuk kaum separatis, merupakan tindakan yang melanggar hukum nasional negara tempat

¹¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandari Maju, 1990), 370.

pemberontakan terjadi. Hal ini disebabkan oleh tindakan para pemberontak yang memaksakan kehendak mereka pada pemerintah yang sah untuk mencapai tujuan yang mereka yakini. Selain itu, tuntutan untuk memisahkan diri dari pemerintahan induk merupakan ancaman terhadap integritas suatu negara¹². Gerakan separatis atau gerakan memisahkan diri yang dilakukan oleh sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan sebuah fenomena universal yang tentunya terjadi di belahan bumi yang memiliki pemerintahan yang sah. Lebih-lebih lagi jika suatu pemerintah itu berlaku tidak adil, tidak menjalankan pemerintahan yang baik maka peristiwa gerakan memisahkan diri itu akan memiliki peluang lebih besar muncul di wilayah tersebut.

Doyle (2010) menyatakan bahwa separatisme adalah sebuah proses sosial yang melibatkan advokasi pemisahan budaya, etnis, suku, agama, ras, pemerintahan, atau gender dari kelompok yang lebih besar. Seperti halnya pemisahan diri, secara tradisional separatisme merujuk pada pemisahan politik. Spencer (1998) juga menggambarkan bahwa kelompok separatisme melibatkan praktik politik identitas atau aktivitas politik yang didasarkan pada pengalaman bersama para anggota kelompok. Kelompok semacam itu meyakini bahwa integrasi dengan kelompok dominan dapat mengancam identitas mereka dan kemampuan untuk mengejar penentuan nasib sendiri yang lebih besar. Dalam perspektif lain, Roehner (2016) menyoroti bahwa separatisme dan disintegrasi berkembang melalui kombinasi faktor-faktor, termasuk motif ekonomi. Roehner (2016) mencatat bahwa perjuangan separatisme sering mengikuti pola yang sama,

¹² Sefriani, Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka, (UNISIA, No.47, XXVI, 2003) 41-42

dan referensi pada perjuangan separatisme masa lalu dapat memberikan wawasan terhadap gangguan baru-baru ini di wilayah yang sama, meskipun motivasi eksplisitnya telah berubah. Roehner (2016) mengklasifikasikan tiga jenis perjuangan kaum separatisme, yaitu yang disebabkan oleh perebutan tanah, perebutan bahasa/budaya, dan perebutan kekuasaan politik. Taksonomi ini kemudian digunakan oleh Roehner (2016) untuk mengklasifikasikan berbagai jenis pemberontakan separatisme dalam hubungannya dengan tipe-tipe masyarakat.¹³

Separatisme adalah sebuah ancaman yang bahkan dapat merusak persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Biasanya mereka mempunyai bermacam-macam motif atau tujuan dalam menghidupkan gerakan itu. Salah satunya untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Menurut perspektif pemerintahan yang sah gerakan ini merupakan suatu perlawanan dan pemberontakan yang harus segera ditumpas atau dilenyapkan. Apabila tidak segera dilenyapkan maka gerakan ini dapat mengakibatkan terjadinya keretakan hingga mengancam keutuhan negara. Dalam praktiknya tidak jarang mereka melancarkan gerakannya dengan menggunakan kekerasan, salah satunya dengan melakukan aksi terorisme. Penyebab gerakan ini muncul mempunyai beragam alasan yang kompleks. Mulai dari adanya masalah sosial budaya, ekonomi dan politik tentunya.¹⁴

¹³ Agus Widodo, Keterlibatan Gerakan Separatisme dalam Upaya Kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, (*Journal of Terrorism Studies*, Vol.4, No.1, 2022), 4-5.

¹⁴ Syaiful Anwar, *Melindungi Negara* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 44

Selanjutnya penulis menggunakan beberapa perspektif pemerintahan Indonesia tentang gerakan separatisme ini, alasannya karena penulis mengira Indonesia adalah salah satu negara yang sampai detik ini masih berjibaku melawan gerakan separatis yang ada di tanah Papua¹⁵, atau juga Indonesia dilihat dari sejarah panjangnya pasca kemerdekaan banyak sekali mengalami perlawanan dengan bangsanya sendiri. Teringat dengan salah satu tokoh besar Indonesia mengatakan jika “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”, ucap Soekarno. Isi dari salah satu yang terkandung dari nilai peraturan menteri pertahanan republik Indonesia, bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri.

Munculnya gerakan-gerakan separatis dalam pemerintahan Utsmaniyah ini banyak sekali, setiap masa selalu memiliki gerakan-gerakan tersendiri untuk mencoba merebut kembali dari pemerintahan yang sah ini. Imperium Utsmaniyah sendiri adalah imperium yang sangat besar sekali, sangat luas sekali, menguasai tiga benua sekaligus dan memiliki kekuasaan di mana rakyatnya bermacam-macam latar belakangnya. Mulai dari perbedaan bahasa, sosial, budaya, warna kulit dan berbagai macam perbedaan lainnya. Inilah yang akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Utsmaniyah,

¹⁵ Bambang Cipto, Gerakan Separatis dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Demokrasi (*Journal of History*, Vol 26, No.47, 2003), 13.

dapat tidaknya mengelola daerahnya yang begitu luas. Dari berbagai macam fase panjang Utsmaniyah dalam Sejarah Peradaban Islam, penulis memfokuskan penelitian ini untuk menginvestigasikan pada abad-abad kemerosotan imperium ini. Berbagai macam banyak faktor alasan mengapa mengambil abad ke 18 dan 19 ini.

Beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Abad ke-18 dan 19 merupakan abad kemerosotan performa pemerintahan Turki Utsmani, dari situ gerakan-gerakan separatis akan condong lebih banyak muncul di fase itu
- 2) Gerakan separatis ini penulis ambil dari kalangan-kalangan orang Arab yang setidaknya mempunyai latar belakang yang sama walaupun juga memiliki sisi-sisi yang beda seperti, kesamaan agama, bahasa yang sama walau pemerintah pusat Istanbul menggunakan bahasa Turki namun mereka atau pemerintahan mereka sangat memperkuat literasi dan semangat berbahasa Arab dan yang terakhir kesamaan aliran yaitu Sunni. Abad 18 dan 19 isu perbedaan aliran itu adalah isu yang sangat sensitif, sunni dan syiah selalu menjadi alasan mereka untuk saling serang.
- 3) Pemimpin-pemimpin gerakan separatis yang penulis kaji adalah Zahir Al-Umar, Ali Bey Al-Kabir dan Muhammad Ali. Mereka bukan pemimpin yang amatir, karena gerakan mereka itu di kemudian hari mereka mengumpulkan kekuatan dan kekuatan itu dapat menandingi

kekuatan pemerintahan pusat Istanbul dan gerakan akan menimbulkan petaka bagi kedaulatan *Porte*.

Munculnya gerakan separatis ini salah satu faktor di tubuh Utsmani adalah karena kelemahan pemerintahannya. Disebutkan dalam buku Muhammad Ash-Shalabi mulai tahun 1617 M pemerintahan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Mushtafa I dianggap sultan yang lemah dan ini terus berlaku bagi Sultan-sultan berikutnya sampai kejatuhannya pada tahun 1924 M.¹⁶ Penulis memulai dari pemerintahan keluarga Azm Pasha di Damaskus untuk gerakan separatis penguasa lokal Arab. Walaupun secara *De Facto* pemerintahan ini tidak melakukan gerakan pemisahan diri namun menurut penulis dialah pemimpin yang melatar belakangi munculnya fase penguasa lokal Arab yang diperhitungkan.

Ada kisah yang menarik dari sumber-sumber yang didapat akan pemerintahan Azm di Damaskus ini, karena sumber sejarah ini berasal dari catatan-catatan harian seorang tukang cukur yang ada di Damaskus, Suriah saat ini. Dia bernama Ahmad al-Budayri “al-Hallaq” (tukang cukur) yang gemar sekali mengobrol dan memiliki informasi-informasi lengkap tentang keadaan politik dan masyarakat di Damaskus pada pertengahan abad ke-18. Berbagai macam pembahasan yang dia catat di dalam buku hariannya adalah topic yang umum dibicarakan di semua tempat pangkas rambut: biaya hidup yang tinggi, cuaca, politik lokal dan keluhan tentang bagaimana keadaan tidak lagi sama seperti zaman dulu yang menyenangkan. Terlepas

¹⁶ Ali Muhammad Ash-Salabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk*, terj. Matsuri Irham & Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 303.

dari apa yang ia tuliskan dalam catatan hariannya, para sejarawan banyak yang tidak mengetahui bagaimana kehidupan pribadi Budayri ini.

Dia adalah seorang pria yang sangat sederhana untuk muncul dalam permukaan sejumlah sejarah biografi kontemporer atau dapat dibilang orang-orang penting dalam zaman Utsmaniyah. Dari catatan dia yang menjadi sumber utama penulisan sejarah yang menggambarkan kota Damaskus dan keadaan masyarakat di sana oleh para sejarawan kontemporer salah satunya seperti F.O Nofal, catatan-catatan itu jarang sekali menuliskan tentang sosok pribadinya sehingga itu yang menjadi alasan para sejarawan tidak mengetahui lebih mendalam sosok Ahmad Budayri ini seperti apa, kapan dia dilahirkan dan kapan dia wafat namun dari itu semua yang jelas catatan-catatan tersebut mengulas kehidupan masyarakat Damaskus pada tahun 1741 sampai 1762, ditulis ketika dia cukup dewasa dengan pemikirannya dan sudah mahir menjadi tukang cukur profesional pada zamannya.

Pada tahun 1754 dia mencatat peristiwa yang menggemparkan masyarakat kota Damaskus ketika mendengar berita tentang wafatnya Sultan Mahmud I (berkuasa tahun 1730-1754 M).¹⁷ Lalu setelah itu dia mencatat pula tentang perayaan masyarakat Damaskus yang menandakan naiknya Sultan pengganti yang bernama Osman III (berkuasa tahun 1754-1757 M). Damaskus di sulap menjadi kota yang indah kala itu “dihiasi sangat indahnyanya. Semoga Allah menjaga Negara Utsmaniyah ini, sampai akhir

¹⁷ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 56.

zaman. Amin.”¹⁸ Tukang cukur ini adalah masyarakat yang *sholeh*, yang setia dengan negaranya dan selalu mendoakan yang terbaik akan keberlangsungan pemerintahannya walau dalam beberapa catatan dia banyak sekali mengkritik kebijakan-kebijakan gubernur setempat.

Wilayah-wilayah yang terbilang lebih dekat secara geografis dari Istanbul biasanya akan dipimpin oleh birokrat-birokrat langsung dari Istanbul namun beda halnya dengan wilayah yang terbilang cukup jauh. Biasanya wilayah tersebut dipimpin oleh warga asli setempat sana yang memang mempunyai kompeten di bidangnya. Damaskus kala itu dipimpin oleh keluarga Azm mulai abad ke-17 dan pemerintahannya dibidang cukup memprihatinkan karena mereka sudah terbiasa menumpuk kekayaan dari pendapatan daerahnya. Keluarga Azm mulai menumpuk kekayaan alam Damaskus semenjak mereka berkuasa di wilayah tersebut pada abad ke-17 dengan mengumpulkan lahan pertanian yang begitu luas di kota Hama Suriah Tengah. Kemudian mereka menetap di Damaskus dan menempatkan dirinya di antara orang kaya dan berkuasa di kota itu.

Pada abad ke-18 provinsi-provinsi Arab yang masuk dalam imperium Utsmaniyah cenderung dipimpin oleh para penguasa lokal setempat yang patut dipertanyakan kesetiiaannya dan kejujurannya kepada Sultan. Tahun yang sama pemerintahan Utsmaniyah sebetulnya memiliki birokrat-birokrat yang dapat dibidang pelayan sultan yang setidaknya secara teori memiliki kesetiaan penuh kepada negara dan memerintah tanpa mengutamakan

¹⁸ Ahmad al-Budayri al Hallaq, *Hawadith Dimashq al-Yawmiyya*, (Kairo: Egyptian Association for Historical Studies, 1959), 184.

kepentingan-kepentingan pribadi. Lalu sebaliknya, keluarga Azm besar sekali memiliki kepentingan pribadi dan keluarga jadi tidak menyia-nyiaikan kesempatan emas selagi dia mempunyai waktu untuk menjabat lalu memperkaya diri dan membangun dinasti mereka dengan mengorbankan kepentingan negara Utsmaniyah.

Catatan Budayri membahas tentang beberapa kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh pemimpinnya, As'ad Pasha al Azm. Dia memimpin Damaskus sekitar empat belas tahun lamanya mulai dari tahun 1743 sampai 1757 dan itu menjadi bukti dialah pemimpin Damaskus terlama masa jabatannya dibandingkan dengan para pendahulunya. Budayri mengkritik para gubernur dari kalangan keluarga Azm karena sudah mengeruk dan menimbun kekayaan kotanya lalu bertanggung jawab atas kekacauan moralitas masyarakat dan di kalangan militer. Di bawah pemerintahan As'ad Pasha al-Azm tentara telah berubah dari kekuatan disiplin menegakkan keadilan, hukum dan keamanan menjadi anggota rakyat jelata yang tidak teratur. Pasukan *Janissary* di Damaskus terbelah menjadi dua golongan, yaitu golongan pasukan inti pasukan khilafah yang dikirim secara langsung dari Istanbul (*kapikullari*) dan Pasukan lokal Damaskus (*yerliyye*).¹⁹ Ada juga pasukan Turk pengembara, tentara Kurdi dan tentara Afrika Utara.

Pasukan yang terbelah menjadi dua golongan ini sudah keluar dari tujuan esensi menjadi tentara. Mereka banyak sekali menimbulkan masalah-

¹⁹ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 58.

masalah dalam kota dan selalu menciptakan terror bagi keamanan kota. Pada tahun 1756 M, masyarakat lokal yang mendiami wilayah Amara akhirnya harus membayar mahal atas keberpihakannya kepada tentara pusat (*kapikulari*) karena pada waktu itu tentara pusat bersitegang dengan tentara lokal setempat (*yerliyye*). Tentara lokal melakukan serangan balasan dengan membakar seluruh daerah permukiman Amara tempat-tempat dagang dan rumah penduduk. Dalam konflik tersebut banyak sekali insiden yang berakibat tewasnya penduduk lokal setempat dan setelah apa yang dilakukan oleh para tentara itu mereka sama sekali tidak mendapatkan hukuman. Insiden itu berakibat traumanya para penduduk setempat dan dengan sengajanya mereka kompak menutup seluruh aktivitas perdagangan, toko-toko ditutup total dan akibatnya apa, perekonomian setempat mengalami kelumpuhan. Catatan-catatan Budayri mengisahkan betapa ngerinya yang ditimbulkan oleh para tentara-tentara Utsmaniyah yang seharusnya merekalah figure untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat setempat.

Bukan hanya tentang merosotnya wibawa para tentara Utsmaniyah yang berakibat lumpuhnya perekonomian seperti wilayah Amara barusan namun ditambah lagi dengan masalah perekonomian yang ditimbulkan oleh orang nomor satu di sana, As'ad Pasha al-Azm. Harga pangan di Damaskus ketika keluarga Azm menjabat sebagai gubernur di sana terbelang tinggi dan Budayri menyalahkan atas tingginya harga pangan karena ulah pemimpinnya.²⁰ Tidak hanya keluarga Azm gagal dalam mengelola pasar

²⁰ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 58.

dan menetapkan harga yang terjangkau, tetapi sebagai pemilik lahan yang luas, Budayri berkeyakinan bahwa para gubernur dari kalangan keluarga Azm sesungguhnya telah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menimbun dan menciptakan kekurangan gandum dengan tujuan meraup keuntungan sebesar-besarnya secara pribadi. Suatu ketika harga pangan roti di Damaskus mengalami penurunan harga, As'ad Pasha menyuruh bawahannya untuk melakukan ancaman kepada pengusaha-pengusaha roti setempat untuk menaikkan harga roti tersebut dengan tujuan sang gubernur ingin melindungi pasar gandum yang menjadi sumber utama pemasukannya dan keluarganya.²¹

Legitimasi pemerintahan Utsmaniyah terletak pada bagaimana mereka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keIslaman dan mempertahankan lembaga yang diperlukan oleh rakyatnya untuk menjalani hidup dengan ajaran Islam beraliran Sunni. Namun, pada abad ke-18 kualitas itu seperti sudah memudar dikarenakan kalangan para tentara tentang nilai-nilai kedisiplinan telah kendor buktinya mereka bukannya menciptakan keamanan malah dari kalangan mereka banyak menimbulkan ancaman yang dari itu masyarakat tidak jarang untuk mengancam tindakan-tindakan seperti itu, dikombinasikan lagi dengan keserakahan para gubernur yang menumpuk harta kekayaan mereka dan menimbun hasil kekayaan alamnya, itu semua yang mengakibatkan moral dan akhlak masyarakat rusak perlahan.

²¹ Ibid., hlm. 130.

Pada abad ke-18 kota Damaskus terbilang kota yang konservatif. Di sana, kaum-kaum wanita terhormat menutup rambut mereka, berpakaian ala kadarnya, dan jarang sekali terlihat kaum wanita berbaur dan bergaul di luar rumah mereka untuk saling bertegur sapa dan mengobrol sepintas kecuali hanya dengan keluarga mereka sendiri. Salah satu faktor yang mengakibatkan akhlak masyarakat Damaskus meorosot adalah dibukanya tempat pelacuran. Para pelacur di kota Damaskus cukup banyak dan mereka terbiasa mabuk, berpesta pora dengan para tentara yang juga ikut mabuk. Mereka berjalan di gang, di pasar, di jalanan dengan sangat sengajanya memamerkan wajah dan rambut mereka untuk menebarkan pesona. Gubernur Dmaskus kala itu sudah beberapa kali berusaha untuk melarang adanya tempat-tempat prostitusi semacamnya, namun tetap sia-sia. Para pelacur tidak terlalu memedulikan perintah pemimpinnya karena mereka sendiri dilindungi dan didukung oleh tentara setempat.

Lambat laun, masyarakat Damaskus terkesan seakan-akan mulai menerima kehadiran para pelacur ini di kota mereka. Di antara banyaknya pelacur di sana, ada pelacur yang bernama Salmun. Dia adalah sosok wanita pelacur tercantik pada masa itu, banyak di antara kalangan tentara dan pria-pria nakal lainnya sangat mengagumi kecantikannya. Setiap kali ada barang yang indah maka itu seakan merepresentasikan sosok Salmun. Barang apa saja yang indah dan pakaian apa saja yang indah pada akhirnya akan diberi sebutan baru yaitu “pakaian Salmuni” atau “Barang Salmuni”.²²

²² Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 59.

As'ad Pasha al-Azm mencoba sekali lagi berusaha untuk melarang adanya prostitusi yang seakan sudah mulai terbiasa di kota Damaskus. Pemerintah kala itu memerintahkan untuk melaporkan siapa saja yang terlihat mencurigakan dan penjaga kota dikirimkan untuk memaksa para pelacur ini memakai penutup rambut atau kerudung dengan benar. Namun setelah beberapa minggu tekanan yang dilakukan pemerintah, masyarakat Damaskus melihat kembali aktivitas normal para pelacur ini, menebarkan pesona dengan berjalan di jalan utama kota itu, di jalanan pasar seperti biasa lagi.²³ Sejak saat itu itu As'ad Pasha al-Azm, sang gubernur, meninggalkan segala upaya untuk mengusir para pelacur yang kurang ajar itu.

Dari sini sudah terlihat jelas bahwa menurut penulis, fenomena seperti itu pejabat politik yang memiliki wewenang penuh untuk mengontrol wilayah tersebut nyatanya tidak dapat berbuat banyak mewujudkan itu. Jaringan-jaringan prostitusi semacam itu akan tetap lestari dan mewabah menjangkiti para tentara dan pria nakal lainnya, sehingga ini yang dimaksud Ahmad Budayri tentang kemerosotan akhlak masyarakat setempat. Pemimpin tidak mampu mengontrol penuh para tentaranya, tentara sudah kehilangan nilai-nilai disiplin untuk dapat menegakkan keadilan dan hukum di sana, ditambah lagi dengan pemimpin yang mengeruk dan memperkaya diri sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang begitu massif dan

²³ Ahmad Budayri, *Hadawith Dimashq*, hlm. 27-29.

BAB III

GERAKAN SEPARATISME ZAHIR AL-UMAR (1740-1775 M) DAN MUHAMMADD ALI PASHA (1805-1849 M)

Pada abad ke-18 dan 19 Pemerintahan Utsmaniyah menghadapi tantangan yang serius dalam mempertahankan wilayah territorial yang begitu luas. Gerakan separatisme bermunculan dan menunjukkan eksistensinya masing-masing tak terkecuali gerakan separatisme yang dipimpin oleh Zahir al-Umar dan Muhammad Ali Pasha. Mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama muncul gerakannya di wilayah Arab. Zahir di Palestina Utara dan Muhammad Ali Pasha di Mesir, mereka juga sama-sama beragama Islam. Penulis memilih dua tokoh ini dikarenakan mereka adalah tokoh yang memiliki pengaruh besar, sedemikian besar sehingga sangat mahir mengelola komunitas gerakan separatismenya. Dengan kemahiran yang mereka miliki bahkan sekelas kekuatan militer tentara pusat Istanbul dibuat kewalahan dan beberapa kasus mereka bahkan menerima banyak kekalahan ketika mereka melakukan konfrontasi langsung terhadap gerakan ini.

A. Zahir al-Umar (1740-1775 M)

Zahir al-Umar, beliau berasal dari keluarga Zaydani, yang mendirikan pemerintah semi-independen atas Palestina utara di bawah kepemimpinan Syekh Zahir al-Umar, berasal dari Arab yang tidak jelas. Ada beberapa tanggapan bahwa mereka mengaku sebagai keturunan Zayd bin al-Hasan

bin Ali bin Abi Thalib, cucu Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwa suku Zaydani adalah suku sebagian nomaden ketika pertama kali menetap di Galilea pada paruh kedua abad 17. Banyak sejarawan percaya bahwa Zaydani berasal dari Hijaz secara historis, beberapa gelombang masyarakat bermigrasi dari Jajirah Arab ke utara dalam kondisi sulit, terutama kondisi ekonomi. Kekuatan dagang kaum Zaydani di Suriah, khususnya daerah Palestina menunjukkan motivasi ekonomi dan politik kemungkinan besar menjadi penyebab terjadinya migrasi. Catatan bukti sejarah yang tercatat menunjukkan bahwa beberapa orang zaydan terlibat dalam perdagangan dengan orang Damaskus sebelum mereka tiba di Palestina.¹

Mereka menetap di suatu tempat di sekitar Ma'arrat al-Nu'man di jalur caravan utama antara dua pusat perdagangan utama di Suriah, Damaskus dan Aleppo. Lokasi ini memberikan kesempatan kepada Zaydani untuk mengenai kehidupan perkotaan dan menjalin hubungan baik dengan orang-orang penting di kota yang membantu mereka mengumpulkan kekayaan. Pekerjaan mereka dalam perdagangan harus membuat mereka mengenal pentingnya keuntungan, dan berbagai wilayah di suriah. Kemudian memilih menetap di Galilea, salah satu daerah Palestina. Status dagang mereka memungkinkan mereka mengumpulkan kekayaan,

¹ Thomas Philipp, *Acre kebagkitan dan Kejatuhan Kota Palestina* (New York:PIALA, 2002) 1735.

yang diperlukan untuk menjadikan diri mereka sebagai petani dan kemudian menjadi petani pajak.²

Selama paruh abad ke 17 kaum Zaydani mereka akhirnya menetap di Palestina bagian utara. Dikarenakan sesepuh Zaydanis merasa iri dan dilecehkan oleh beberapa anggota suku Bani Asad karena kekayaannya. Mereka pertama kali tinggal di Tiberias untuk waktu yang singkat, kaum Zaydani terpaksa meninggalkan Tiberias suku Saqr yang mendominasi wilayah barat Tiberias antara Safad dan Nablus, menyampaikan undangan kepada Zaydani untuk menetap di mana saja dalam wilayah kekuasaan mereka. Tempat tinggal baru di sebuah desa kecil bernama Arrabat al-Battuf, di sebelah barat Danau Tiberias di Wilayah Safad. Masyarakat Arrabat al-Battuf menyambut tetangga baru mereka dan kagum oleh keberanian dan kemurahan hati sesepuh Zaydani untuk menerima semua orang. Pada tahun 1697, dinasti Shihab menggantikan Manids sebagai penguasa Gunung Lebanon. Amir Bashir shihab, anggota Shihab pertama yang mengambil alih kekuasaan setelah kematian Amir Manid terakhir mengangkat keponakannya Amir Mansur sebagai gubernur Sanjad Safad. Beliau mengangkat Umar al-Zaydani sebagai bawahan Mansur dengan pangkat Syekh.

Bahwa posisi klan Zaydani yang sudah ada telah mendorong untuk memilih menempatkan Syekh Umar pada posisinya untuk melayani kepentingan yang luas dengan mengamankan pemerintah Shihab melalui

² Mulakhhkhas, *Tarikh al-Syekh Zahir*, 539.

pengaruh Zaydani nenek moyangnya berhasil memantapkan diri sebagai petani pajak di wilayah Safad di bawah kekuasaan kaum Manids yang mendorong Amir Bashir menawarkan posisi yang sama kepada Syekh Umar. Pada tahun 1701 Amir Mansur meninggal dan Syekh Umar al-Zaydani dipromosikan menjadi gubernur Safad dan wilayah sekitarnya.³ Pada tahun yang sama, Amir Bashir meninggal di Safad, ia digantikan oleh amir Haydar Shihab. Sayda berpindah tangan lalu Sayda mengangkat Zahir putra syekh sebagai syekh Safad.

Akka dan daerah kekuasaannya. Dua decade setelah kematian Syekh Umar, sebagian besar wilayah Galilea berada di kendali kaum Zaydani. Zahir mewakili Zaydani dalam hubungan mereka dengan pemerintah dan petani. Keluarga tersebut memperkuat hubungan mereka dengan otoritas Ott Pada akhir tahun 1720-an, kaum Zaydani dan Saqr berencana menduduki Tiberias, memprovokasi pemberontakan *mutasalimi* (gubernur yang ditunjuk oleh wali).⁴

Mereka berhasil menangkapnya. Dan dikirim ke Pasha Sayda, menyatakan bahwa para *mutasalimi* menindas, menganiaya, dan melanggar hak-hak masyarakat Tiberias. Selain itu Syekh Zahir memberi tahu pasha bahwa negara hanya dapat diperintah dengan keadilan dan menahan diri dari penindasan. Syekh Zahir berjanji kepada pasha bahwa jika secara resmi

³ T. Canaan, "The Saqr Bedouin of Bisan." *Journal of Palestine Oriental Society*, Vol.16 (1936): 25

⁴ Mansur, *Tarikh al-Nasirah*. 49

memberi Tiberias dan Arrabah dia akan membayar biayanya secara penuh dan tepat waktu, lalu Pasha Sayda menyetujui permintaan Zahir.

Zahir mulai membetengi Tiberias untuk mengantisipasi ancaman dari masa depan, dan pada awal tahun 1730-an, kota itu menjadi markas utamanya. Toleransi Zahir, Pemerintah yang adil dan administrasi yang efisien mendorong masyarakat desa sekitar untuk bercita-cita berada di bawah pemerintahan dan perlindungannya, Zahir diberikan lahan pajak di wilayah tertentu, menegakkan keadilan dan keamanan bagi wilayah para petani dan melindungi mereka dari perwakilan pemerintah dan orang Badui pada akhir tahun 1730-an, Zahir telah menguasai sebagian besar wilayah Safad. Langkah Zahir selanjutnya adalah melawan Safad, pusat wilayah dan sekitarnya. Karena wilayah Safad strategis di atas bukit dan menguasai pedesaan di sekitarnya. Bahwa Zaydanis bukanlah wilayah yang asing dan masyarakatnya, sejak akhir tahun 1690-an mereka pernah Bertani di sebagian besar wilayah Galilea.⁵

Selain pusat wilayah Safad, terdapat beberapa benteng penting dan desa-desa kecil diseluruh Galilea seperti al-Banah, Sihmatah, dan Dayr al-Qasi. Pada tahun 1740, Zahir mencaplok Safad dan dua benteng pertama melalui diplomasi. Beliau meyakinkan syekh mereka, Muhammad Nafi, untuk turun tahta demi kepentingannya dan dia setuju, namun Zahir gagal meyakinkan Syekh Abd al-Khaliq Salih dari Dayr al-Qasi untuk melakukannya juga, Syekh Zahir akhirnya dapat menguasai Dayr al-Qasi

⁵ Ahmad Joudah, *Zahir al-Umar dan yang Pertama Otonom Rezim di Ottoman Palestina*, terj. Fahmy Yamani (1744-1775) (Bayrut: al-Muassasah Arabiyah 2015) 21.

ketika beliau menikahi putri Syekh Salih. Istri zahir dari Damaskus tinggal di Nazareth ketika Zaydani berada di Arrabah, dan melalui dia mampu menjalin hubungan persahabatan yang kuat dengan orang-orang Nazareth. Mayoritas masyarakatnya beragama Kristen yang terlibat dalam perdagangan. Mereka menyambut pemerintahan Zahir karena beliau membebaskan mereka dari penindasan penguasa Nablus dan pemerasan terhadap para saudagar mereka. Kaum Nazareth lebih menyukai kebijakan toleran Zahir di wilayah kekuasaannya, terhadap non-muslim. Pada tahun 1740, Syekh Zahir al-Umar berhasil menguasai Galilea timur dengan pusat utamanya, Safad, Tiberias, dan Nazareth.

Setelah Syekh Zahir mengrekonstruksi kekuasaannya atas Galilea timur, beliau memandang ke arah Galilea barat, ekspansinya ke Mediterania tidak dapat dihindari karena telah menempatkan dirinya di daerah pedalaman yang kaya dan subur. Meningkatnya permintaan Eropa akan kapas berkualitas tinggi di distrik Galilea, Safad memperkuat tekad Zahir untuk melakukan ekspansi ke barat. Untuk menguasai Akka mempunyai urusan bisnis dan potensi keuntungan dengan bisnis dengan bangsa Eropa yaitu Perancis dan Inggris. Pada tahun 1744, Syekh Zahir berhasil menguasai Akka dan beliau mengubahnya menjadi ibu kotanya dan mulai berupaya meningkatkan benteng dan pertahanannya yang selesai tahun 1750.⁶ Pada tahun 1750 Syekh Zahir mendominasi seluruh Galilea, Marj ibn 'Amir dan wilayah pesisir yang mencapai kurang lebih sepuluh mil di

⁶ Ahmad Hasan Joudah, *Revolt in Palestine in the Eighteenth Century* (Amerika: Georgias Press, 2013), 59.

selatan Haifa. Kemakmuran ekonomi memberikan kontribusi besar terhadap meningkatnya kekuatan politik Zahir. Ia menjadi pemain utama dalam politik provinsi Damaskus dan Sayda, khususnya wilayah Palestina dan Lebanon selatan, hingga tahun 1775.⁷

Secara umum, kebijakan Zahir yang toleran dan terbuka terhadap agama minoritas membuatnya mendapat dukungan dari penduduk Matwalis di Jabal 'Amil (Libanon selatan). Keamanan, ketertiban dan keadilan, yang berlaku di seluruh wilayahnya, sangat penting bagi kemakmuran wilayah kekuasaannya dan perluasan serta kelangsungan rezimnya. Kondisi ekonomi, sosial dan administratif yang menguntungkan ini menarik masuknya beragam imigran dari beberapa provinsi dan negara (misalnya Siprus dan Yunani). Pendatang baru bergegas ke wilayah Zahir, khususnya ke Akka, pusat pemerintahannya.

Perkembangan ekonomi dan komersial ini mendorong ledakan konstruksi untuk mengimbangi meningkatnya kebutuhan. Keadaan ini mendorong Zahir untuk mendirikan sejumlah bangunan: khan untuk para pedagang Perancis dan pasar lokal dengan lebih dari seratus toko kecil untuk perdagangan dalam negeri dan pedagang lokal. Ia juga mendirikan dua masjid, pemandian umum, dan pabrik sabun. Yang terpenting, dia membentengi kota, memperkuat tembok tua dan perkembangan ekonomi

⁷ M. Sabagh, *Tarikh Zahiri*. 44

dan komersial ini mendorong ledakan konstruksi untuk mengimbangi meningkatnya kebutuhan.⁸

Keadaan ini mendorong Zahir untuk mendirikan sejumlah bangunan: khan untuk para pedagang Perancis dan pasar lokal dengan lebih dari seratus toko kecil untuk perdagangan dalam negeri dan pedagang lokal. Ia juga mendirikan dua masjid, pemandian umum, dan pabrik sabun. Yang terpenting, dia membentengi kota, memperkuat tembok tua. Aliansi Zahir dengan Matwali mengamankan perbatasan utaranya, membebaskannya dari bahaya yang mengancam wilayah selatannya. Pertama, pendudukannya di Nazareth telah menimbulkan kebencian terhadap para pemimpin feodal di Gunung Nablus; dan kedua, penaklukkannya atas 'Akka telah meningkatkan tekad para pemimpin untuk mengendalikan ambisi Zahir. Memiliki kepentingan strategis dan finansial bagi Zahir untuk mengendalikan al-Tirah dan al-Tanturah, dua desa di selatan 'Akka, serta Bilad Harithah dan Marj ibn'Amir, dataran paling subur tidak hanya di Palestina tetapi juga di Suriah Raya, terkenal dengan produksi gandum, tembakau dan kapas, serta lokasinya yang strategis.

Marj ibn 'Amir menghubungkan pesisir laut dengan daerah pegunungan di pedalaman; salah satu jalur perdagangan utama antara Mesir dan Damaskus juga melewati dataran ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hal ini menjadi rebutan antara Syekh Zahir, penguasa Galilea, dan para pemimpin feodal Jabal Nablus. Keduanya bersaing untuk

⁸ Al-Bustani, *Syekh Zahir al-Umar Dairat al-Maarif XI*. 404

menguasai produksi dan perdagangan kapas di Suriah selatan. Kebijakan ekonomi Zahir adalah memberlakukan semacam monopoli perdagangan kapas dengan para pedagang Eropa, sedangkan para pedagang Nablus lebih tertarik untuk menguasai perdagangan kapas dengan Damaskus dan Mesir, sehingga menimbulkan konflik kepentingan kedua belah pihak.

Penunjukan 'Utsman Pasha al-Kurji sebagai wali Damaskus pada tahun 1760 mengakhiri periode perdamaian panjang yang terjalin antara pasha Damaskus dan Sayda di satu sisi dan Syekh Zahir al-'Umar. Sejak kematian Sulaiman Pasha al-'Azm pada tahun 1743 selama kampanye melawan Tiberias, benteng Zahir, tidak ada satu pun gubernur yang melakukan upaya tulus untuk menaklukkan Zahir. As'ad Pasha al-Azm mempertahankan kebijakan hubungan damai dengan Syekh Zahir. Kebijakan ini hendak diubah oleh wali baru Damaskus, Husain Pasha ibn Makki, yang pada tahun 1757 mengancam akan membunuh Zahir jika dia tidak meninggalkan wilayah yang merupakan bagian dari provinsi Damaskus. Beruntung bagi Zahir, kafilah haji yang dikomandani Husain Pasha diserang, dan dia tidak pernah kembali ke Damaskus.⁹

Penunjukan 'Utsman Pasha al-Kurji (juga dikenal sebagai al-Sadiq) sebagai wali al-Sham mengubah keberpihakan politik di Suriah. 'Utsman Pasha menantang otoritas Syekh Zahir dan berusaha menghancurkannya, namun dia gagal melakukannya. Namun, upaya 'Utsman Pasha membantu melibatkan tidak hanya kekuatan lain di wilayah tersebut tetapi juga

⁹ Yanni, *Zahir al-Umar*. 320

beberapa negara Eropa. Sebuah aliansi disimpulkan antara Ali Bey dari Mesir dan Syekh Zahir. Mereka mendapatkan dukungan militer dari armada Rusia di Laut Mediterania, sebuah peristiwa yang sangat penting: peristiwa ini menandai intervensi Eropa pertama di Timur Arab pada zaman modern.

Karir Zahir pada tahun 1760, dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pada tahun 1761–62, Zahir mengambil strategi pertahanan, melindungi wilayah kekuasaannya dari kemungkinan serangan 'Utsman Pasha al-Kurji. Kedua, ia harus menghadapi beberapa pemberontakan antara tahun 1763 dan 1767 yang dipimpin oleh beberapa putranya dan didukung oleh musuh luar ayah mereka.¹⁰ Ketiga, setelah masalah-masalah ini terselesaikan, ia bersekutu (1768–71) dengan Ali Bey dari Mesir, menduduki Damaskus, dan akhirnya mengakhiri masa jabatan gubernur 'Utsman Pasha yang lama di Suriah.

Husain Pasha, gubernur Damaskus dan komandan ziarah, digulingkan tetapi tidak terlalu menderita akibat Porte. Pada tahun 1762, ia diangkat menjadi gubernur Mar'ash, di mana ia menjabat selama hampir satu tahun, setelah itu ia diangkat kembali menjadi gubernur di kampung halamannya, Gaza. Pada saat ini, Zahir memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui aspirasinya untuk memperluas kekuasaannya atas Palestina selatan hingga Gaza. Oleh karena itu, ia mengirimkan surat kepada al-Sayed 'Abd al- Latif, tersebut Naqib al-Ashraf di Yerusalem,

¹⁰ Ahmad Hasan Joudah, *Revolt in Palestine in the Eighteenth Century* (Amerika: Georgia Press, 2013), 72.

memintanya untuk menggunakan jasa baiknya dengan otoritas provinsi Ottoman demi kepentingannya.

Zahir menerima dukungan dari Syekh Qublan dari Matwalis dan Muhammad Pasha al-Azm, gubernur Sayda, dalam perjuangannya melawan Utsman Pasha dari Damaskus dan putra-putranya yang memberontak. Ia juga menerima dukungan moral dari Amir Mansur, pangeran Druze, yang, dalam upaya bersama dengan Amir Isma'il dari Hasbaya, menjadi penengah untuk mendamaikan perbedaan antara Syekh Zahir, putranya 'Utsman, dan sekutunya Syekh Nasif. Namun, bukan kepentingan Druze untuk melihat Matwali mengalahkan Syekh Zahir, yang merupakan penantang terkuat melawan pasha Damaskus. Salah satu alasannya adalah bahwa suku Druze mungkin menganggap Zahir sebagai sekutu penting dalam menjamin stabilitas di wilayah yang berbatasan dengan wilayah mereka, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Matwali. Pada akhir tahun 1767, Zahir membuat perjanjian aliansi dengan Matwali, dan dengan demikian berhasil merebut wilayah Jabal Amil dalam wilayah pengaruhnya.¹¹

Pada bulan September 1767, konferensi perdamaian diadakan di Ras al-'Ayn dekat Sur. Dihadiri oleh Syekh Zahir, Syekh Nasif, dan delegasi Amir Mansur yang dipimpin oleh 'Ali Junblat. Zahir berhasil, dan perdamaian tercapai antara dia dan putranya, Utsman. Dia kembali bersama ayahnya ke 'Akka dan dari sana melanjutkan ke Nazareth, yang telah

¹¹ Ahmad Hasan Joudah, *Revolt in Palestine in the Eighteenth Century* (Amerika: Georgia Press, 2013), 73.

diberikan Zahir kepadanya sesuai perjanjian. Namun perlu dicatat di sini bahwa perjanjian ini tidak diterima oleh Syekh Nasif al-Nassar, yang terus mengadu domba putra-putra Zahir dengan ayah mereka. Perbedaannya dengan Zahir akhirnya didamaikan pada bulan Desember 1767.¹²

Pada akhir tahun 1767, Zahir telah menyelesaikan perselisihannya dengan putra-putranya dan mendapatkan kembali kendali penuh atas wilayah kekuasaannya. Dia juga menyimpulkan perjanjian persahabatan dengan Syekh Nasif al-Nassar dari Matwalis, yang akhirnya berkembang menjadi aliansi yang kuat berkat mediasi putra Zahir, 'Utsman. Lebih jauh lagi, 'Utsman al-Zahir memainkan peran penting bersama Nasif dalam mendamaikan perbedaan antara Amir Mansur dan Yusuf, di satu sisi, dan antara Yusuf dan Haydar, gubernur Balabak, Utsman juga menikmati rasa hormat yang tinggi dan persahabatan yang erat dengan orang Prancis di Sayda dan 'Akka, yang beberapa kali memanggilnya untuk menjadi perantara dengan ayahnya. Dengan demikian, ketegangan hubungan yang terjadi di antara kelompok-kelompok kekuasaan yang berbeda, terutama diprovinsi Sayda sejak awal tahun 1760-an, mereda pada bulan Desember 1767.

Pada tahun 1770 M Zahir al-Umar mendekati pemimpin Mesir yang bernama Ali Bey dengan menawarkan perjanjian untuk menguasai Damaskus¹³. November 1770 M, Zahir menemani panglima Ali Bey yang bernama Ismail Bey dalam perjalanan wilayah Palestina. Mereka menyeberangi wilayah Yordan dan

¹² B Doumani, *Menemukan Kembali Palestina: Pedagang dan Petani di Jabal Nablus 1700-1900* (Berkeley: Universitas California Press, 1995), 82.

¹³ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2017), 71.

bergerak ke arah timur menggunakan jalur Haji yang menyusuri pinggiran gurun. Kemudian pasukan aliansi itu bergerak cepat menuju Damaskus berniat merebut kota itu dari gubernur Utsmaniyah, mereka berhasil mencapai Desa Muzayrib, perjalanan satu hari di selatan Damaskus.

Ketika Ismail Bey masuk Muzayrib, dia berhadapan dengan Gubernur Damaskus namun dia kehilangan semangat untuk bertempur dikarenakan saat itu adalah musim haji dan Gubernur Usman Pasha sedang menjadi pemimpin rombongan haji tersebut. Ismail Bey adalah orang yang shaleh, dia mendapatkan banyak pendidikan agama dibandingkan dengan para Mamluk yang lain, pikir dia, jika menyerang Gubernur saat sedang melaksanakan perjalanan menuju Haji itu sama saja dengan pelanggaran agama yang berat. Akhirnya dia memerintahkan pasukannya untuk mundur dari Muzayrib dan kembali ke Jaffa.

Zahir al-Umar melakukan protes atas tindakan sepihak yang diputuskan oleh Ismail Bey ini, namun tetap sia-sia, ekspedisi itu terhenti sepanjang musim dingin 1770-1771.¹⁴ Atas kejadian tersebut, Ali Bey mengirim pasukan kedua yang berjumlah sekitar 35.000 tentara Mamluk yang dipimpin Muhammad Bey. Mereka bergerak melintasi Palestina dengan begitu cepat dan selang melakukan pertempuran kecil mereka langsung berhasil mengusir Gubernur Damaskus pada bulan Juni 1771 M. Aliansi Zahir al-Umar dengan kaum Mamluk Mesir akhirnya menguasai dari wilayah Mesir, Hijaz, Palestina dan juga Damaskus

Koalisi tersebut tidak lama bertahan dan mengalami keretakan akibat ketidakkonsistensinya para panglima Ali Bey dan mereka malah berkhianat

¹⁴ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 72.

berbalik melawan tuannya sendiri. Pada tahun 1775 M usia dari penguasa Palstina Utara itu sudah mencapai umur 86 tahun, cukup renta untuk terus melanjutkan ambisinya yang tidak ada ujungnya. Akhirnya dia menyerah atas desakan terus menerus oleh Gubernur Utsmaniyah dan juga faktor usia yang sangat mempengaruhi.

Di detik-detik akhir hayatnya dia membayar penuh pajak yang biasanya dia tahan dan berkata “saya sudah tua dan sudah tidak berani berperang.” Para menteriya setuju dan terlihat sudah lelah melakukan peperangan yang begitu panjang. “Kita adalah muslim, taat kepada Sultan. Karena, setiap Muslim yang percaya pada satu Tuhan tidak diizinkan untuk bertempur melawan Sultan dalam bentuk apapun.”¹⁵

B. Muhammad Ali Pasha (1805-1849 M)

Mesir telah menempuh perjalanan menuju menjadi negara Islam modern. Transformasi tersebut termasuk meninggalkan sistem pemerintahan lama yang berlaku pada masa kekhilafahan dan dinasti-dinasti sebelumnya. Setelah masa kejayaan Mesir kuno di bawah pemerintahan raja-raja Firaun, negara tersebut kemudian diperintah oleh suku dan etnis yang berasal dari luar Mesir. Pasca kejatuhan Firaun, Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium). Selanjutnya, Mesir dibebaskan dari kekuasaan Romawi oleh pasukan Islam pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Selama berabad-abad,

¹⁵ Ahmad al-Shihab, *Tarikh Ahmad Pasha al-Jazzar* (Acre), 45.

Mesir diperintah oleh penguasa-penguasa dari kalifah-kalifah Rasyidun, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah yang mayoritas berasal dari etnis Arab.¹⁶

Selama pemerintahan khalifah dari Dinasti Bani Abbasiyah, Mesir melihat kedatangan bangsa Turki dari Bani Thulun dan Bani Ikhsyid, yang membuat Mesir menjadi entitas politik yang mandiri. Setelah masa pemerintahan Bani Ikhsyid, Mesir kemudian kembali diperintah oleh bangsa Arab dari Dinasti Fatimiyah, yang merupakan keturunan dari Fathimiyah yang menganut aliran Syi'ah Islam. Dinasti Fatimiyah memerintah Mesir dari tahun 969 M hingga 1117 M. Di bawah pemerintahan mereka, Mesir menjadi sebuah negara merdeka dalam bentuk khilafah, yang secara politik dan ideologis terpisah dari khilafah Bani Abbasiyah. Selama periode ini, kota Kairo didirikan dan Universitas al-Azhar didirikan.

Muhammad Ali Pasha adalah keturunan Turki yang lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1769 M, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 M. Ayahnya, Ibrahim Agha, adalah seorang imigran Turki yang lahir di Yunani. Ibrahim Agha bekerja sebagai penjual rokok dan juga menjabat sebagai kepala petugas di sebuah kota di daerahnya. Muhammad Ali Pasha memiliki 17 orang putra, salah satunya adalah Muhammad Ali.

Setelah dewasa, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kemahirannya dalam pekerjaan ini, ia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani. Akhirnya, ia diambil sebagai menantu Gubernur, yang membuat namanya semakin dikenal. Kemudian, ia bergabung dengan dinas militer dan menunjukkan keterampilan yang tinggi, sehingga pangkatnya cepat naik menjadi

¹⁶ Adb. Rahim Yunus, *Historiografi Dunia Islam Modern*, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), 63.

perwira. Muhammad Ali Pasha harus bekerja keras sejak kecil untuk membantu keluarganya, sehingga ia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan tidak pandai menulis atau membaca. Sebelum masuk dinas militer, ia pernah menjadi pedagang rokok, lalu bekerja sebagai pemungut pajak, dan karena kemahirannya, ia menjadi kesayangan Gubernur Utsmani setempat.

Setelah bergabung dengan dinas militer, ia menunjukkan kecakapan, keberanian, dan kesanggupannya yang luar biasa, sehingga pangkatnya cepat naik menjadi perwira. Karena kecakapan dan keberaniannya, ia dipercaya oleh Sultan Turki Utsmani untuk memegang jabatan panglima pasukan Albania yang dikirim ke Mesir untuk mengusir tentara pendudukan Prancis. Dalam pertempuran melawan tentara Prancis, ia menunjukkan keberanian yang luar biasa, sehingga diangkat menjadi kolonel. Akhirnya, ia beserta pasukannya berhasil mengusir tentara pendudukan Prancis dari Mesir.

Pada tahun 1805 M, penduduk Mesir memilih dan mengangkat Muhammad Ali sebagai Gubernur Mesir. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada Sultan Salim III, yang pada saat itu memerintah sebagai Sultan Turki Utsmani. Mereka berharap agar Sultan Turki bersedia memberi restu dan mengukuhkan Muhammad Ali sebagai Gubernur Turki di Mesir. Setahun kemudian, Muhammad Ali secara resmi diakui sebagai Gubernur Mesir oleh Turki Utsmani. Pada tahun 1807, bersama dengan rakyat Mesir, ia berhasil menggagalkan intervensi Inggris di Mesir yang terjadi pada tahun 1801 M. Keberhasilan Muhammad Ali mengambil alih kekuasaan di Mesir tampaknya didorong oleh beberapa faktor. Pertama, ia mendapatkan dukungan kuat dari

penduduk Mesir yang merasa muak terhadap pemerintahan Mamluk. Kebencian mereka terhadap kaum Mamluk terbukti beralasan, karena ketika mereka berkuasa di Mesir, situasinya menjadi tidak stabil dan penuh kekacauan.¹⁷

Pada tahun 1798 M, kaum Mamluk telah melakukan pemungutan pajak dengan kekerasan, sering kali disertai dengan perlakuan kasar terhadap penduduk Mesir. Selain rasa benci terhadap mereka, hubungan antara penduduk Mesir dan kaum Mamluk juga tidak dekat, terutama karena perbedaan bahasa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menyebabkan Muhammad Ali mendapat dukungan dari penduduk Mesir. Selain itu, pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Ali terdiri dari orang-orang Albania, bukan orang-orang Turki, yang memiliki disiplin dan ketaatan tinggi serta mendapat pelatihan yang baik dari seorang kolonel tentara Prancis yang masuk Islam, yang kemudian dikenal sebagai Sulaiman Pasya al-Paransawy, yang bertindak sebagai pelatih dan mengorganisir pasukan secara modern. Hal ini terbukti karena pasukan tersebut mampu mengalahkan pasukan Turki Utsmani yang ingin merebut kembali Mesir setelah tentara Prancis pergi.

Ketiga, kedua kelompok yang berselisih, yaitu kaum Mamluk dan Turki Utsmani, berada dalam posisi yang lemah baik secara politik maupun militer. Hal ini terbukti dengan mudahnya ekspedisi Napoleon merebut kekuasaan di daerah tersebut, seperti yang terjadi dalam perjalanan perang di Mesir. Napoleon mendarat di Alexandria pada tanggal 1 Juli 1798 dan keesokan harinya kota pelabuhan tersebut jatuh. Sembilan hari kemudian, kota Rasyid di sebelah Timur Alexandria juga jatuh.

¹⁷ M. Dahlan M, *Sejarah Peradaban Islam*, (Makassar: AlauddinPress, 2013) 198

Pada tanggal 21 Juli, tentara Napoleon mencapai daerah Piramida di dekat Kairo. Pertempuran terjadi di tempat tersebut, dan kaum Mamluk tidak mampu melawan senjata-senjata meriam Napoleon, sehingga melarikan diri ke Kairo. Akhirnya, pada tanggal 22 Juli, tidak sampai tiga minggu setelah mendarat di Alexandria, Napoleon berhasil menguasai Mesir. Pada awalnya, Bangsa Turki Utsmani adalah suku nomaden yang selalu mencari lahan perburuan baru di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Turki. Pada awal tahun Masehi, Bangsa Turki Utsmani dikenal sebagai Bizantium di bawah kekuasaan Romawi, yang memerintah di kawasan ini selama lebih dari empat abad. Setelah peristiwa Barbarian merebut kekuasaan dari tangan Romawi, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Konstantinopel (sekarang Ankara). Awal berdirinya Dinasti Utsmaniyah banyak diceritakan dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300, melibatkan kejatuhan Kerajaan Saljuk. Dinasti ini berasal dari suku Qoyigh Oghus, yang awalnya menempati daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina selama sekitar tiga abad. Kemudian, mereka bermigrasi ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka memeluk agama Islam pada abad ke-9 atau ke-10 ketika menetap di Asia Tengah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika menginjak usia dewasa, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak. Karena keuletan dan kerajinannya dalam pekerjaan tersebut, ia akhirnya menjadi menantu kesayangan seorang Gubernur Utsmani. Hal ini meningkatkan statusnya dan membuat namanya semakin dikenal. Selanjutnya, ia bergabung dengan dinas militer, di

mana kecakapan dan kesanggupannya dalam menjalankan tugas terlihat jelas. Berkat keterampilannya, ia akhirnya diangkat menjadi seorang perwira.¹⁸

Dalam mengatur organisasi militernya, Muhammad Ali Pasha pertamanya melakukan rekonstruksi terhadap kekuatan militernya. Ia percaya bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Seperti yang terlihat dalam pertempuran dengan tentara Prancis, Muhammad Ali Pasha menunjukkan keberanian dan kekuatan militernya yang luar biasa, sehingga ia diangkat menjadi seorang kolonel. Prestasi ini diakui oleh rakyat Mesir, yang menyaksikan langsung keberanian dan kesuksesan Muhammad Ali Pasha dalam mengalahkan Napoleon.

Kemudian, setelah memperoleh kepercayaan dari rakyat dan pemerintah pusat di Turki, Muhammad Ali Pasha menumpas semua lawan-lawannya, terutama golongan Mamluk yang masih berkuasa di daerah-daerah. Akhirnya, Mamluk berhasil ditumpas habis oleh Muhammad Ali Pasha, menjadikannya sebagai penguasa tunggal di Mesir. Ia menghadapi berbagai pemberontakan dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Ketika Sultan Turki menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri, Sultan selalu meminta bantuan dari Muhammad Ali Pasha, termasuk dalam menghadapi penyerbuan kaum Wahabi yang kemudian berhasil dimusnahkan oleh Muhammad Ali Pasha.¹⁹

Walaupun masa pendudukan Napoleon di Mesir singkat, hanya sekitar 3 tahun 6 bulan, dampaknya sangat signifikan. Melalui ekspedisi ini, gagasan-gagasan dan peradaban Barat berkembang dan menyebar di tanah Mesir yang subur.

¹⁸ Muh. Mastury, Muhammad Ali Pasha (*Jurnal al- Jami'ah*, Vol.10, No. 13), 56-60.

¹⁹ Ahmad Rofi Usman, *Jejak-Jejak Islam kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Bunyan, 2015), 92.

Setelahnya, terjadi perdebatan dan pertarungan gagasan antara Barat dan Timur. Akhirnya, pengaruh Barat memengaruhi perkembangan Mesir di masa yang akan datang, terlihat pada era Muhammad Ali Pasya, yang dianggap sebagai bapak pendiri Mesir modern.

Muhammad Ali memulai perjuangannya ketika ia dan pasukannya dikirim ke Mesir untuk mengusir Napoleon. Sultan Salim III mengumpulkan pasukan untuk melawan tentara Napoleon yang telah menguasai Mesir dan menyerang Syria serta Istanbul. Muhammad Ali, salah satu perwira dalam pasukan itu, menunjukkan keberanian luar biasa dalam pertempuran melawan tentara Prancis dan dipromosikan menjadi kolonel. Saat tentara Prancis meninggalkan Mesir pada tahun 1801, Muhammad Ali memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan kekuasaan politik yang terjadi. Kaum Mamluk, yang sebelumnya melarikan diri dari Napoleon, kembali untuk memegang kekuasaan mereka di Kairo. Namun, Muhammad Ali mengadu domba antara Mamluk dan pasukan Usmani yang datang dari Istanbul, memperoleh simpati rakyat Mesir yang membenci Mamluk. Selanjutnya pada tahun 1804 M bertepatan pada hari keenam bulan Muharram, Muhammad Ali dan pasukan Albanianya keluar menuju wilayah Inbaba. Sesampainya di sana mereka melakukan persiapan dengan membentuk formasi barikade pertahanan dan memasang meriam untuk bersiap melakukan peperangan. Pada hari kesebelas bulan Muharram pasukan Mamluk Arab menekan barikade tersebut dan berselang empat jam pertempuran berakhir. Pemimpin Mamluk

Hosni Bey meninggal atas pertempuran tersebut yang menguntungkan pihak Ali karena setidaknya pesaingnya berkurang.²⁰

Muhammad Ali memulai dengan menyerang musuh yang paling lemah, mengepung pasukan yang dikirim oleh Sultan, yang akhirnya menyerah dan dipaksa kembali ke Istanbul. Dia kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Pasya baru Mesir dan akhirnya diakui oleh Sultan Usmani pada tahun 1805. Setelah mencapai puncak kekuasaan di Mesir, dia mulai menghilangkan potensi ancaman terhadap kekuasaannya, terutama kaum Mamluk. Ketika ada upaya pembunuhan terhadapnya yang kemudian terbongkar, Muhammad Ali berpura-pura mengampuni yang lain. Namun, pada suatu kesempatan, dia mengundang mereka untuk berpesta di istananya di Bukit Mukattam. Setelah mereka semua masuk, pintu-pintu menuju area istana dikunci, dan sebelum pesta selesai, dia memberi tanda untuk membunuh mereka semua. Menurut cerita dari 470 kaum Mamluk, hanya satu orang yang berhasil melarikan diri dengan melompat dari pagar istana ke jurang di Bukit Mukattam, meskipun kudanya mati. Mereka yang tersisa di luar Kairo kemudian diburu, sebagian berhasil dibunuh dan sebagian kecil melarikan diri ke Sudan. Pada akhir tahun 1811, kekuatan kaum Mamluk di Mesir sudah habis.

Pada tahun 1831, Muhammad Ali memerintah putranya untuk melakukan serangan ke wilayah Palestina yang kala itu di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Dengan cepatnya pasukan Mesir yang berjumlah 30.000 berhasil menundukkan Palestina November 1831. Selanjutnya mereka berhasil menaklukkan benteng yang terletak di wilayah Akko sekitar enam bulan lamanya melakukan

²⁰ Abdurrahman Al-Jabarti, *'Ajaib al-Atsar fi at-Tarajum wa al-Akhbar*, (Kairo: Yayasan Hindawi, 1880), 133.

pengepungan pada Mei 1832. Satu tahun berselang pada Mei 1833 pasukan Mesir yang di bawahi oleh Ibrahim Pasha berhasil sampai puncak tertinggi mendiami wilayah Kutahya di Anatolia Barat dan itu hanya berjarak 200 kilometer dari ibu kota Khilafah Utsmaniyah, Istanbul. Sultan Mahmud II menyerah dan menyetujui tuntutan yang dilayangkan oleh Muhammad Ali.

Sultan Mahmud II pada tahun 1839 wafat akibat penyakit TBC yang dideritanya, lalu kepemimpinan Sultan digantikan oleh anaknya yang masih muda yang bernama Abdul Majid I (1839-1861). Laksamana Angkatan Laut Utsmaniyah yang bernama Ahmed Fevzi Pasha khawatir dengan pemerintahan pusat Istanbul yang lemah karena kurang pengalamannya Sultan yang masih belia itu. Dia takut jika armada tempur lautnya jatuh ke tangan Russia karena ambisi besar Russia untuk menguasai wilayah Laut Hitam yang memberikan akses ke Laut Tengah.

Saat itu negara-negara Eropa khawatir dengan gejolak di wilayah Utsmaniyah. Inggris takut jika Russia akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan itu untuk menguasai Selat Bosphorus dan Dardanella sehingga memberikan akses pada armadanya ke Laut Hitam untuk masuk ke Laut Tengah. Hal ini akan menjungkirbalikkan kebijakan Inggris sekian puluh tahun lamanya yang dirancang membendung armada Russia di Laut Hitam.²¹ Akhirnya Inggris membentuk koalisi yang terdiri dari Austria, Prussia untuk menekan kepemimpinan Muhammad Ali Pasha. Pada Januari 1841 Ibrahim Pasha

²¹ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 114.

menyerah dan melakukan penarikan mundur secara teratur dari wilayah Suriah melalui jalur darat ke Mesir.



Gambar 3.1 Tampilan Awal Sumber Primer

Sumber: <https://www.hindawi.org/contributors/28182839/>

واستهلت سنة تسع عشرة ومايتين وألف (١٨٠٤م)

فلما شاع ذلك في المدينة رفعوا ما كان موجودًا من الغلة بالعرصات، وشئت الغلال وُعِد الفول والشعير، وبيع ربع الويبة من الفول بتسعين نصفًا، وقل وجود الخبز من الأسواق، وخطف بعض العسكر ما وجدوه من الخبز ببعض الأفران، وأخذوا الدقيق من الطواحين، وصار بعض العسكر يدخل بعض البيوت ويطلبون منهم الأكل والعليق لدوابهم.

وفي يوم الخميس والجمعة اشتد الحال، وبيع ربع الويبة من القمح بسبعين نصفًا وثمانين نصفًا وُعِد الفول، واشترى بعض من وجده ربعًا بمائة نصف فضة؛ فيكون الأردب على الحساب بألفين وأربعمائة نصف، وخرج عساكر كثيرة ووقعت حروب بين الفريقين، ورجع القبليون إلى طرا وحاربوا عليها، وكانوا شرعوا في عمارة ما تهدم من أبراجها ونقلوا إليها الذخيرة والقومانية والجبخانة والعسكر، وأخذوا جمال السقاين لنقل الماء إلى الصهريج الذي بجزيرة طرا، ودار الأغا والوالي على المخازن ببولاق ومصر، وأخذوا منها ما وجدوه من الغلة وأمروا ببيعه على الناس بخمسين نصفًا الربع، وأخذوا لأنفسهم ما وجدوه من الشعير والفول.

وفي يوم السبت قلدوا حسن أغا نجاتي الحسية فخافته السوقة، واجتهدوا في تكثير العيش والكعك والمأكولات بقدر إمكانهم، واجتهد هو أيضًا في الفحص على الغلال المخزونة وبيعها للخبازين، وأما اللحم الضائي فإنه انعدم بالكلية لعدم ورود الأغنام.

وفيه شح ورود الغلة في العرصات، وذهب أناس إلى بر إنبابة فاشترى الربع بثمانين نصفًا وأزيد من ذلك، والفول بمائة وعشرين وعلق أكثر الناس على يهايمهم ما وجدوه من أصناف الحبوب، مثل: الحمص والعدس، وهم المياسير من الناس، وأما غيرهم فاقترضوا على التبن، وأما العنب والتين في وقت وفرتهم فلم يظهر منهما إلا القليل، وبيع الرطل من العنب بأربعة عشر نصفًا، والتين بسبعة أنصاف، وذلك بعد سلوك الطريق ومشي السفن.

وفي يوم الأحد رابع عشره اجتمعت العساكر الكثيرة للحرب عند شبرا، ورموا على بعضهم بالمدافع والقرايين والبنادق من ضحوة النهار، ثم التحم الحرب بين الفريقين واشتد الجراد بينهما إلى منتصف النهار، وصير الفريقان قتل بينهما عدة كبيرة من العسكر الأرنؤدية وطايفة الممالك والعربان، فقتل من أكابر العسكر أربعة أو خمسة ودخلوا بهم المدينة، وانكف الفيتان وانحازا إلى معسكرهما، وبعد هجعة من الليل اجتمع

١٢٣

GaGG

Gambar 3.2 Catatan Al-Jabarti tentang Muhammad Ali Pasha

Sumber: <https://www.hindawi.org/contributors/28182839/>

BAB IV

DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI MUNCULNYA GERAKAN SEPARATISME DI TANAH ARAB

Gerakan Separatisme yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh yang penulis deskripsikan dalam penelitian ini mulai dari Zahir al-Umar di Palestina dan Muhammad Ali Pasha di Mesir menimbulkan kegaduhan yang cukup besar di pemerintahan Utsmaniyah dan memiliki dampak nyata seperti hilangnya pengaruh kuat Turki Utsmaniyah di wilayah Arab, melemahnya internal kekuasaan pemerintah yang rapuh akan intervensi bangsa asing lalu selanjutnya memutus integrasi para pemimpin lokal Arab yang terbukti ketika zaman Zahir al-Umar banyak melakukan konfrontasi dengan pemimpin-pemimpin suku Arab yang mendiami wilayah Levant. Bukan hanya itu saja, dampak selanjutnya seperti terganggunya pemasukan pajak yang berarti mengurangi pemasukan negara, ini akan berakibat timbulnya masalah-masalah baru karena dalam dasar pemerintahan Utsmaniyah mereka memahami konsep kenegaraan itu seperti, pemerintah yang baik merupakan keseimbangan empat elemen saling bergantung yang dipahami sebagai lingkaran ekuitas. Pertama, negara membutuhkan pasukan yang besar untuk menjaga kekuasaannya. Negara membutuhkan kekayaan yang besar untuk mengurus pasukan besar dan pajak adalah satu-satunya sumber rutin kekayaan negara. Untuk mengumpulkan pajak, negara harus meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Agar rakyat menjadi makmur, negara harus menerapkan hukum yang adil yang membawa kita ke awal lingkaran, kembali ke tanggung jawab negara.

Sebagian besar pengamat politik Utsmaniyah kala itu menggambarkan gangguan politik sebagai adanya pengabaian salah satu dari keempat elemen tersebut.¹

Lingkaran ekuitas tersebut telah rusak dengan adanya provinsi-provinsi yang selalu merongrong baik itu ingin memisahkan diri atau hanya sekedar menumpuk kekayaan pribadinya. Sesuai dengan apa yang sudah disebutkan oleh Budayri al-Hallaq di atas sendi-sendi pemerintahan Utsmaniyah sudah terlihat rusak. Tentara sudah kehilangan disiplinnya dan ketidakmampuan penguasa mengontrol tentaranya sehingga inilah gambaran pemerintahan Utsmaniyah abad ke-18. Ini juga memicu timbulnya gerakan reformis pada masa Sultan Mahmud II yang penulis akan masukan pada dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya gerakan-gerakan Separatis.

Teori ambisi pribadi telah menggambarkan bahwa bagaimana seorang penguasa regional yang bernama Zahir al-Umar di Palestina Utara dan Muhammad Ali di Mesir menunjukkan ambisinya dalam menguasai pemerintahan dalam suatu wilayah. Bagaimana Zahir al-Umar ketika menjabat sebagai gubernur Palestina menimbulkan ambisi-ambisi lain yang bermunculan. Salah satu faktor yang memicu timbulnya ambisi Zahir untuk berhenti membayar upeti tahunan karena sistem politik yang mendukung. Bermula sejak awal abad ke-18 kebiasaan administrasi Utsmaniyah tentang pencatatan pembayaran perpajakan secara terperinci ditiadakan dan kontrol pengawasan wilayah regional oleh pusat Istanbul

¹ Eugene Rogan, "*Dari Puncak Khilafah*", terj. Fahmi Yamani (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 56.

mulai renggang dikarenakan Porte terlalu sibuk meladeni perang melawan Austria di Balkan dan Pyotr yang Agung dari Russia di Utara.

Menurut Joseph A. Schlesinger salah satu faktor pemicu adanya ambisi politik dikarenakan sistem politik yang mendukung dan memunculkan peluang atas pemenuhan ambisi itu. Ketika proses ambisi itu tengah dijalankan maka banyak kebijakan-kebijakan politik yang terpengaruh oleh pilihan rasional yang selaras dikemukakan oleh James Coleman. Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan berupaya memenuhi nilai-nilai dan kebermanfaatan ambisi pribadi itu. Semakin tujuan itu memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi maka semakin pula mendekati hasrat ambisi mereka dalam berpolitik.

A. Reformasi Kebudayaan Arab

1. Pengaruh Prancis

Semenjak Muhammad Ali menjabat sebagai penguasa provinsi wilayah bagian Mesir pada 18 Juni 1805, banyak perubahan yang terjadi setelahnya baik itu di dalam Mesir sendiri maupun bagian permukaan Imperium Utsmaniyah. Penulis menggambarkan mengapa salah satu dampak yang ditimbulkan ketika gerakan separatisme menguak di permukaan Imperium itu salah satunya adalah intervensi bangsa asing karena sebelum Muhammad Ali menjadi penguasa Mesir, wilayah ini tujuh tahun lalu sudah dijamah secara langsung oleh bangsa Prancis yang dipimpin Napoleon. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama bangsa Eropa menginjakkan kaki di Timur Tengah.

Rakyat Mesir dihadapkan budaya dan tata cara orang Prancis, ide-ide pencerahan dan teknologi dari revolusi industri Prancis². Maksud penulis adanya intervensi bangsa asing yang diakibatkan oleh gerakan separatis itu, walaupun kejadiannya sebelum Muhammad Ali berkuasa di Mesir namun ketika dia tertunjuk menjadi Pasha di sana, dia melestarikan apa yang sudah dibentuk oleh Prancis, sengaja berkolaborasi dengan Prancis, banyak mengadopsi nilai-nilai dan budaya Prancis dan melestarikan fenomena westernisasi di Mesir.

Pada tahun 1821, provinsi Peloponesia Yunani yang berada dalam Imperium Utsmaniyah sedang mengalami huru-hara pemberontakan oleh kaum-kaum yang terpengaruh oleh paham nasionalisme. Pemberontakan itu diawali dengan anggota perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai *Filiki Etairia* yang memiliki arti “Perkumpulan Sahabat”, perkumpulan ini dibentuk pada tahun 1814 M dengan *goals* nya mendirikan negara Yunani dan memperoleh kemerdekaan. Orang-orang Yunani adalah kelompok terpisah yang disatukan oleh bahasa, iman Kristen Ortodoks, dan sejarah yang mencakup periode klasik hingga Kekaisaran Bizantium Helenisme³. Pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani berakibat timbulnya ancaman yang lebih besar daripada pemberontakan yang ditimbulkan oleh penguasa Arab kala itu.

Pemberontakan itu akhirnya pecah pada bulan Maret 1821 M dan begitu cepatnya menyebar hingga bagian Kepulauan Aegea, pulau Kreta, Makedonia dan Yunani bagian tengah. Pemerintahan Utsmaniyah merasa tidak mampu mengatasi

² Rogan, “*Dari Puncak Khilafah*”, 87.

³ Rogan, “*Dari Puncak Khilafah*”, 104.

pemberontakan yang kebanyakan dilakukan secara gerilya dan meminta bantuan Pasha Mesir untuk menangani gejolak di wilayah Yunani. Akhirnya pada tahun 1824 M, Muhammad Ali mengutus anaknya yang bernama Ibrahim Pasha untuk berangkat dan memadamkan api pemberontakan. Dia memimpin pasukan infanteri yang berjumlah 17.000 prajurit terlatih dan empat tim artileri jarak jauh. Ketika Mesir dengan prajurit terlatihnya yang berjumlah 17.000 anggota yang semua itu sebenarnya adalah rakyat-rakyat petani asli Mesir memenangkan pertempuran melawan Yunani dan akhirnya Ibrahim Pasha berhasil menjinakkan api-api nakal rakyat Eropa. Baik itu di kepulauan Aegea dan Kreta semuanya berhasil ditundukkan dan sementara waktu wilayah tersebut dipaksa untuk tunduk kembali kepada tuan lamanya Utsmaniyah. Prestasi yang diraih oleh Ibrahim Pasha membuat Sultan Mahmud terkesan dan langsung sebagai bentuk imbalannya beliau mengangkat sang Pasha muda ini menjadi penguasa baru di wilayah Balkan bagian Selatan.

Ibrahim Pasha menjadi gubernur di provinsi Yunani terbilang sebentar hanya sekitar tiga tahun semenjak kemenangannya pada tahun 1824 lalu tiga tahun kemudian pada 1827 Oktober pasukan sekutu Eropa bersatu untuk menenggelamkan kapal-kapal Mesir.⁴ Salah satu dari anggota sekutu tersebut adalah Prancis, walaupun Prancis sebenarnya mempunyai kedekatan dengan Mesir namun mereka terpaksa melakukan itu atas desakan publik yang terjadi di ibu kota Paris karena solidaritas kaum-kaum Non-Muslim atas rakyat Yunani yang juga Non-Muslim pula. Semakin terlihat jika bangsa Eropa baik itu dari segi

⁴ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 104.

pemerintahnya ataupun rakyatnya sudah mulai sering melakukan campur tangan terhadap kepentingan-kepentingan pemerintahan Utsmaniyah.

Tidak terlalu banyak dan signifikan menurut penulis intervensi yang dilakukan oleh Prancis yang benar-benar dapat mengganggu kestabilan pemerintahan yang ada di Mesir karena pada dasarnya Prancis dapat dibilang adalah sekutu bagi Mesir. Muhammad Ali banyak mengadopsi konsep-konsep kenegaraan yang ada di Prancis salah satunya dengan banyak mengirim para mahasiswa untuk melakukan studi di sana salah satunya adalah Rifa'ah al-Thahtawi dia adalah seorang penulis, guru dan cendekiawan muslim Mesir yang menimba ilmu di Prancis. Dia sangat kagum dengan peradaban yang ada di Prancis, beberapa kali dia menulis tentang Prancis atas kekagumannya.

Pertama kalinya ada seorang anak muda Arab yang menulis tentang peradaban Prancis yang sebelumnya para sarjana-sarjana Prancis lah yang menulis tentang bagaimana situasi saat itu ketika berada di Mesir pada tahun 1798 M.⁵ sebagai seorang yang lahir di Mesir dalam cakupan peradaban Islam, tentunya dia merasa bangga dan merasa bahwa peradabannya lah yang unggul dibandingkan dengan peradaban lain. Dia beranggapan bahwa Eropa memiliki peradaban yang tertinggal dibandingkan dengan peradabannya. Menurut penulis ini sangat wajar karena sebagai orang yang lahir di pemerintahan Utsmaniyah, Imperium itu adalah Imperium terbesar pada zamannya yang mencakup berbagai wilayah sekaligus tiga benua dikuasainya. Maka sangat wajar jika penduduk Arab

⁵ L. Newman, “*An Imam in Paris: Al-Tahtawi's Visit to France (1826-1831)* (London: Saqi, 2004), 95.

umumnya bangga dan merasa peradaban mereka masih unggul terbukti dengan ketika pertama kali satu pleton tentara Inggris pertama kali menawarkan bantuan kepada gubernur Iskandariyah pada tahun 1798.

Abdullah Pasha al-Azm selaku gubernur yang menjabat kala itu menolak dengan mentah-mentahnya bantuan yang ditawarkan oleh Inggris. Alasan diapun menolak tawaran itu adalah masih beranggapan bahwa peradabannya terkhususnya pemerintahan Utsmaniyah adalah pemerintahan yang unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa. Akhirnya ketika tentara Mamluk di bawah pemerintahan Abdullah Pasha yang masih mengandalkan pasukan kavalerinya ketika berkonfrontasi langsung dengan tentara Prancis lari tunggang-langgang hancur dibuat ketakutan oleh mesin bubuk mesiu dan formasi taktik gaya baru model tentara modern yang dimiliki Prancis. Di saat itu lah mereka tersadar bahwa ada bangsa yang jauh sudah melampaui mereka.

Al-Thahtawi menulis dengan semangat rasa ingin tahu yang tinggi juga tentunya menyertakan sikap kritisnya. Dia mampu mengamati secara langsung bagaimana kehidupan yang ada di negara Prancis sana, dengan pengamatan langsungnya itu dia meyakini bahwa bangsa Eropa memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. “Demi Allah, selama saya tinggal di Prancis, sedih dengan kenyataan bahwa negara ini telah menikmati semua hal yang tidak ditemui di dalam berbagai kerajaan Islam,” tulisnya.⁶ Dia menilai perlunya menjelaskan bagaimana Astronom Eropa membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dia menyadari betapa jauh tertinggalnya dunia Islam di belakang bangsa Eropa kala

⁶ Newman, “*Al-Tahtawi’s Visit to France*”, 249.

itu dalam hal teknologi ilmu pengetahuan meyakini dunia Islam harus mengejar ketertinggalan ini dengan cara mempelajari apa-apa yang ada di Barat karena selama ini bangsa Eropa mulai mengalami kemajuan ketika masa Renaisans itu dibangun atas kemajuan ilmu pengetahuan Islam abad pertengahan. Dia berpendapat bahwa bangsa Utsmaniyah meminjam teknologi dari Barat itu karena menagih utang bangsa Barat atas ilmu pengetahuan Islam.⁷

Muhammad Ali sendiripun menurut penulis adalah penguasa Mesir yang progresif. Dia banyak sekali mengadopsi sistem-sistem yang dia tiru dari Barat terkhususnya dari Prancis sebagai partner sekutunya. Mulai dari banyaknya mengirim para pelajar untuk menimba ilmu di Paris hingga mendatangkan penasihat militer Prancis guna merancang kembali unit-unit militer dengan gaya militer modern. Terbukti dengan itu semua pemerintahan Utsmaniyah kewalahan menghadapi tantangan dari kekuatan Mesir dan akhirnya mereka juga banyak mencontoh apa yang diterapkan Muhammad Ali dalam memajukan pemerintahannya.

2. Pengaruh Inggris

Selanjutnya, setelah penulis menjelaskan bagaimana intervensi yang dilakukan Prancis, maka giliran berikutnya adalah Inggris menjadi bangsa yang sering ikut campur dalam urusan negeri Utsmaniyah. Pada abad ke-18 bangsa Eropa mempunyai negara yang akan banyak memberikan perubahan dalam perjalanan sejarah secara keseluruhan. Selain Prancis, Inggris lah bangsa yang

⁷ Newman, "Al-Tahtawi's Visit to France", 161

dimaksud. Mereka menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dalam bidang manapun. Baik dari segi ilmu pengetahuan, temuan-temuan baru, teknologi, administrasi atau pun sistem dalam pemerintahan.⁸ Pada awal abad ke-19, Prancis dan Inggris berlomba menyebarkan pengaruhnya ke berbagai macam bangsa. Ketika perang antara Prancis x Inggris di subbenua India untuk memperebutkan tanah itu pada tahun 1756-1763 M. perang selama tujuh tahun itu menjadi julukan perang tersebut. Inggris memenangkan pertempuran itu dan setelah itu ketika Prancis mendaratkan armadanya di Mesir pada tahun 1798 M maka Inggris merasa itu adalah halangan musuhnya untuk mengganggu kepentingan Inggris di subbenua India karena Mesir adalah jalur terdekat yang menghubungkan Laut Tengah ke Samudera Hindia melalui Laut Merah.

Dengan dikuasainya Mesir oleh Prancis itu membuat persaingan antara kedua negara superpower itu bertambah. Namun walaupun mereka sering bersaing dan berlomba untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh bangsa namun terkadang mereka ada kalanya bekerja sama dalam urusan tertentu seperti pengusiran tentara Mesir di Yunani atau semenanjung Peloponesia. Inggris memandang bahwa kedaulatan wilayah Turki Utsmaniyah tidak boleh diganggu gugat karena itu dapat menimbulkan konflik lama kembali antar negara Eropa. Maka pada tahun 1800 an awal Inggris lebih menjadi negara pelindung bagi keamanan wilayah Turki Utsmaniyah. Namun dalam hal ini Inggris menekan pemerintahan Utsmaniyah dan Mesir untuk mundur dari wilayah Yunani dan

⁸ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambil Ilmu Semesta, 2017), 126.

akhirnya pada tahun 1832 Inggris, Prancis dan Russia sepakat untuk mendirikan negara Yunani merdeka.

Sama halnya ketika Muhammad Ali berhasil menduduki wilayah Suriah dari pemerintahan Utsmaniyah pada tahun 1832 M, bangsa Eropa prihatin akan hal itu terlebih Inggris. Ketika Sultan Mahmud II wafat karena penyakit TBC nya pada 30 Juni 1839 M, anaknya Abdul Mejid I sebelum menggantikan posisi ayahnya terjadilah kekosongan kekuasaan.⁹ Ini membuat pemerintahan Inggris khawatir karena mereka takut Russia akan memanfaatkan kekosongan kekuasaan itu untuk menguasai Selat Dardanella dan Bosphorus yang jika itu terjadi membuat Russia memiliki akses untuk dapat masuk ke Laut Tengah. Ini akan sangat mengganggu terkait kebijakan Inggris sekian puluh tahun lamanya yang memang dirancang untuk menghadang pasukan armada laut Russia memasuki Laut Hitam dan menolak akses ke pelabuhan air hangat tujuannya untuk menstabilkan kekuatan armada maritime tentunya untuk keuntungan Inggris itu sendiri.

Selanjutnya pemerintahan Inggris berusaha untuk menghentikan upaya Muhammad Ali melakukan penyebaran pengaruhnya di wilayah Mediterania Timur. Inggris memimpin suatu koalisi yang beranggotakan negara-negara Eropa yang tidak melibatkan Prancis karena kita tahu sendiri Prancis adalah sekutu Mesir. Koalisi itu mendukung penuh upaya Pemerintahan Utsmaniyah untuk menegaskan kembali pemerintahannya yang sementara ini diambil alih oleh pasukan Mesir di bawah komando Ibrahim Pasha, anak Muhammad Ali. Koalisi beranggotakan Inggris, Austria, Prussia dan Russia mencoba menawarkan

⁹ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 126.

Muhammad Ali pemerintahan seumur hidup di wilayah Damaskus jika mereka bersedia mundur dan mengembalikan wilayah Utsmaniyah yang sudah direbut seperti di Nezib kini wilayah itu bernama Nizib, provinsi Gaziantep Turki dan beberapa bagian wilayah Suriah untuk dikembalikan ke pemerintahan Utsmaniyah. Namun Muhammad Ali menolak tawaran itu.

Pada tanggal 11 September armada sekutu mulai melakukan serangan pada posisi Mesir baik itu di Akko ataupun di Beirut,¹⁰ armada itu di pimpin oleh Laksamana Inggris, Napier. Dalam hanya tiga jam armada pasukan Inggris-Austria-Utsmaniyah berhasil menghancurkan benteng Akko yang susah ditembus itu. Bayangkan saja sebelumnya pasukan Mesir di bawah komando Ibrahim Pasha berupaya merebut benteng itu dan akhirnya berhasil dijebol itu membutuhkan waktu enam bulan lamanya. Dapat dibayangkan seberapa kuat tiga armada pasukan bersatu ini. Dengan cara yang tak terbayangkan sehingga para tentara di dalam benteng Akko langsung melarikan diri, tidak menyisakan seorang pun untuk mempertahankannya.¹¹ Koalisi itu berhasil merebut benteng Akko dan akhirnya pemerintahan Utsmaniyah berhasil memulihkan kembali kendali atas wilayah itu.

Setelah berhasil mereda ancaman yang ditimbulkan oleh Mesir kini Pemerintahan Utsmaniyah harus menyelesaikan permasalahan itu secara resmi. Perjanjian keputusan itu dilaksanakan di London, lalu pemerintahan Utsmaniyah memberikan Muhammad Ali kekuasaan seumur hidup atas Mesir dan Sudan.

¹⁰ Eugene Rogan, *Dari Puncak Khilafah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017), 104.

¹¹ Wheeler Thackston "Murder, Mayhem, Pillage and Plunder: The History of Lebanon in the Eighteenth and Nineteenth Centuries" (Albany: SUNY Press, 1988), 165-169.

Bukan hanya Muhammad Ali saja, Porte juga memberikan kekuasaan atas Mesir kepada keluarga Muhammad Ali. Inggris juga menginginkan adanya ketenangan dan keamanan di wilayah Mediterania Timur. Jaminan terbaik untuk menghindari konflik negara-negara Eropa untuk mendapatkan keuntungan strategis di wilayah Levant adalah dengan memastikan keutuhan Kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Dalam konvensi itu pula sebetulnya ada pesan tentang kesepakatan antara bangsa Inggris, Prussia, Russia dan Austria berkomitmen untuk tidak menyebar luaskan kekuasaan wilayah di pemerintahan Utsmaniyah. Penulis juga mendapatkan dan menyertakan beberapa poin isi dari konvensi itu:

- 1) Yang Mulia berjanji untuk memberikan kepada Muhammad Ali untuk dirinya sendiri dan keturunannya langsungnya dan Yang Mulia berjanji selanjutnya untuk memberikan kepada Muhammad Ali seumur hidupnya gelar Pasha
- 2) Upeti tahunan yang harus dibayarkan oleh Muhammad Ali kepada Sultan harus sebanding dengan luas wilayah pemerintahan yang akan diperoleh oleh Muhammad Ali.
- 3) Bahwa Muhammad Ali telah menyerahkan diri tanpa syarat kepada Sultannya, dan bahwa ia telah meminta maaf.
- 4) Bahwa sebagai bukti penyerahannya, beliau harus memulihkan armada Utsmaniyah, yang setelah diserahkan kepada komisaris yang ditunjuk oleh Yang Mulia Sultan.
- 5) Bahwa seluruh Suriah telah dievakuasi oleh pasukan Mesir.
- 6) Bahwa kekuasaan Sultan telah tegak kembali secara hukum di Suriah.

- 7) Bahwa Yang Mulia Sultan berkenan menerima penyerahan Muhammad Ali beserta anak-anaknya dan kepada keluarganya, suatu pengampunan mutlak.
- 8) Bahwa Yang Mulia , menuruti nasehat sekutunya dan pada saat yang sama berkenan menyatakan niatnya untuk mengembalikan Muhammad Ali ke fungsinya sebagai Pasha Mesir, dengan pemerintahan turun temurun untuk keturunannya. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam intruksi bertanggal 15 Oktober 1840.¹²

Pemerintahan Utsmaniyah selalu berupaya untuk meredam tantangan dalam internalnya. Sesuai dengan interpretasi penulis bahwa mulai abad ke-18 sampai akhir kekuasaan Utsmaniyah, mereka lebih fokus untuk mempertahankan wilayahnya dibanding dengan memperluasnya. ketika mereka fokus perang melawan bangsa asing Russia dan Austria, mereka akhirnya melihat resiko pengabaian wilayah Arab tanpa pengawasan yang ketat. Aliansi Zahir al-Umar dengan Ali Bey al-Kabir memberikan ancaman atas wilayah pemerintahan Utsmaniyah di wilayah Suriah dan Mesir dan selanjutnya ancaman itu datang dari Muhammad Ali yang menggunakan kekayaan Mesir untuk dapat membentuk pasukan baru yang membuatnya mempunyai otonomi daerah seluas-luasnya dan sarana untuk mengancam kedaulatan Utsmaniyah. Jika bukan karena intervensi bangsa-bangsa Eropa, Muhammad Ali dengan kekuatan tentara yang disiplin itu dapat saja menggulingkan pemerintahan Utsmaniyah. Semua kejadian ini menjadikan pengalaman bagi pemerintah Porte untuk segera melakukan berbagai macam reformasi.

¹² Office of the Historian, Sekretariat Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, undang-undang No.485 tahun 1879 tentang Konvensi London untuk Pengamanan Levant, pasal 1-6.

Pemerintah Utsmaniyah sadar bahwa mereka tidak mampu melakukan reformasi tanpa bimbingan dari negara-negara Barat. Para pejabat dan birokrat Utsmaniyah telah mencatat bagaimana Muhammad Ali sukses dalam menerapkan berbagai gagasan dan teknologi modern Eropa dalam membentuk Mesir yang jauh lebih modern. Pemerintah Utsmaniyah memasuki babak baru yaitu babak di mana Eropa akan menjadi panutan dan model percontohan baik itu dalam bidang kemiliteran ataupun juga dalam bidang teknologi. Selanjutnya, para reformis Utsmaniyah terbukti akan kesulitan dalam menjawab tantangan yang muncul saat ia mulai mengadopsi ide-ide bangsa Eropa tanpa mengorbankan nilai-nilainya sendiri dan integritas budayanya.

B. Reformasi Sistem Pemerintahan

Pemerintah Utsmaniyah dan warga Arab mengalami interaksi yang cukup signifikan dengan bangsa-bangsa Eropa memasuki abad ke-19 sehingga mau tidak mau itu semua cukup menyadarkan orang-orang Arab untuk mengakui bahwa bangsa Eropa telah melampaui mereka baik itu di bidang ekonomi maupun bidang militer. Namun masih ada sebagian dari warga Utsmaniyah tetap menganggap bahwa budaya dunianya masih unggul, namun sebagian yang lain terutama kaum reformis berpendapat bahwa mereka harus bias mengadopsi berbagai gagasan dan teknologi kaum Eropa jika tidak mau bangsa Eropa menguasai mereka. Salah satu tokoh cendekiawan yang dimiliki oleh kaum Muslim kala itu adalah Rifa'ah al-Thahthawi, dalam studinya di Paris dia menuliskan, "Demi Allah selama saya

tinggal di Prancis saya sedih dengan kenyataan bahwa Negara ini telah menikmati semua hal yang tidak ditemui di dalam berbagai kerajaan Islam.”¹³

Ketika kepemimpinan Sultan Mahmud II berakhir dan digantikan oleh anaknya Sultan Abdul Mejid I, kontrol pemerintahan dipegang oleh perdana menteri dan beberapa menteri yang terBaratkan. Mushtafa Rasyid Pasha yang menjabat sebagai duta besar di Paris dan London yang setelah itu menjabat sebagai menteri luar negeri pada akhir masa Sultan Mahmud II memunculkan surat yang kemudian dikenal dengan *Khat Syarif Balkhanah* yang Setelah surat tersebut, muncullah edaran-edaran yang isinya dapat kita simpulkan dalam poin-poin berikut ini:

1. Menjaga kehidupan dan kemuliaan serta kekayaan semua rakyat dalam bentuk yang sebaik-baiknya tanpa melihat pada sisi akidah dan agamanya.
2. Memberikan jaminan cara yang baik dalam mendistribusikan dan pengumpulan pajak.
3. Memberlakukan keadilan dalam kewajiban militer serta menentukan rentang waktunya.
4. Persamaan dalam hak dan kewajiban antara orang muslim dan non muslim.¹⁴

Maka dimulailah masa baru yang disebut dengan masa penertiban kebijakan pemerintahan Utsmani, di antaranya berisi tentang penghormatan kemerdekaan umum, penghormatan pada hak milik dan individu tanpa melihat

¹³ Daniel L. Newman, *An Imam in Paris: Al-Tahtawi's Visit to France 1826-1831* (London: Saqi, 2004), 99.

¹⁴ Ali Hasun, *Tarikh Al-Daulat Al-'Utsmaniyyah* (Beirut: Maktab Al-Islami), 186.

pada faktor agama dan keyakinan mereka. Pada kesepakatan dizaman baru ini disebutkan tentang persamaan semua agama di depan undang-undang.¹⁵

Beberapa tokoh agama dari Yunani, Armenia, dan Yahudi berkumpul di kepulauan Metlin untuk mendengarkan pidato dari Rasyid Pasya, yang mengklaim sebagai seorang reformis atas nama Sultan. Dalam pidatonya, ia menyatakan, "Wahai kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi, kalian semua adalah warga negara dari satu kekaisaran, anak-anak dari satu bapak. Sultan menganggap kalian semua sama." Namun, apa yang disebut sebagai "tulisan mulia" atau undang-undang yang didukung oleh Mushtafa Rasyid dan beberapa orang dekatnya menimbulkan kontroversi dan tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Arab yang beragama Islam. Para ulama segera mengeluarkan fatwa menolak dan mengafirkan Rasyid Pasya. Bagi kalangan ulama, "tulisan mulia" dianggap sebagai pengingkaran terhadap Al-Qur'an Al-Karim secara umum, terutama karena isinya yang menyamakan orang-orang Kristen dan Muslim. Bahkan, tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan, kebijakan tersebut dianggap hanya akan menimbulkan kerusuhan di kalangan rakyat yang berada di bawah kekuasaan Sultan.

Tujuan utama dari semua ini jelas untuk mewujudkan strategi dan langkah-langkah Freemasonry, yaitu membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan orang Kristen untuk melawan pemerintahan Utsmani. Dengan proyek ini, akidah Islam yang mencakup konsep wala' dan baraa' (loyalitas dan

¹⁵ Ali Az-Zahrani, *Al-Inhirafaat Al-'Aqadiyah wa 'Al-Amaliyah* (Makkah: Dar Ar-Risalah), 226.

disloyalitas) dihapus dari pandangan umat. Pada saat yang sama, hal yang sangat penting dalam hukum syariah Islam yang berkaitan dengan Ahli Dzimmah dan hubungan kaum Muslim dengan non-Muslim dihilangkan. Perlu diperhatikan bahwa keluarnya "kath syarif kalkhanah" adalah kesepakatan yang diterima oleh Inggris dan negara-negara Eropa dari Sultan Utsmani sebagai kompensasi dari peredaman konflik antara Sultan dan gubernur Mesir Muhammad Ali Pasha yang menginginkan kemerdekaan dan pemisahan dari pemerintahan Utsmani. Krisis hubungan antara Mesir dan pemerintahan Utsmani terjadi pada tahun 7255-7257 H./1839-1841 M.

Perlu ditekankan di sini bahwa tekanan dari Eropa secara umum, terutama dari Inggris, merupakan faktor utama yang menyebabkan gerakan "pembaruan" dan reformasi pemerintahan Utsmaniyah pada abad ke-19 M. Meskipun ada faktor lain yang ikut berperan dalam gerakan ini, seperti keyakinan pemerintahan Utsmani dan individu yang terpengaruh oleh budaya dan peradaban Barat Eropa mengenai perlunya perubahan dalam struktur pemerintahan Utsmani dan upaya pembaharuannya dengan mengadopsi serta mengambil inspirasi dari konstitusi Eropa tanpa mempertimbangkan hukum-hukum syariah.

Dengan rekomendasi berisiko yang dikeluarkan oleh pemerintahan Utsmani untuk mendekatkan diri pada negara-negara Eropa, Sultan telah melanggar tradisi pemerintahan Utsmani dan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Tradisi dan syariah sebenarnya tidak mengizinkan kaum Muslim dan non-Muslim memiliki hak yang sama di dalam kekhalifahan kaum Muslim. Perbedaan hak antara keduanya harus dijaga. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa pejabat

pemerintahan Utsmani menyadari bahwa tradisi lama tidak lagi sesuai sebagai hukum, dan satu-satunya jalan adalah mengadopsi metode-metode Barat, meskipun bertentangan dengan syariah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.¹⁶

Rasyid Pasya mendirikan Majelis Perwakilan dan merancang undang-undang baru yang menetapkan sanksi sesuai dengan hukum-hukum baru tersebut. Dia juga mempekerjakan seorang ahli hukum Perancis khusus untuk merumuskan konstitusi baru bagi pemerintahan Utsmani. Dengan tegas, dia melaksanakan undang-undang konvensional yang dibuat manusia tersebut dan menuntut penghormatannya dari warga negara. Selanjutnya, didirikanlah bank pemerintah dan dikeluarkan uang kertas. Pada tahun 1856 M, Sultan Abdul Majid mengeluarkan keputusan yang memperkuat apa yang telah diucapkan oleh Rasyid Pasya. Keputusan tersebut juga memperluas hak istimewa dan perlindungan bagi warga non-Muslim. Dalam sejarah Utsmani, terdapat apa yang dikenal sebagai "Khat Hamayuni," yang lebih audacious daripada sebelumnya dan lebih banyak mengadopsi prinsip-prinsip dari Barat. "Khat Hamayuni" ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dihapuskannya undang-undang yang melarang suap dan kerusakan.
2. Persamaan dalam masalah mobilisasi militer antara kaum muslimin dan non-muslim.

¹⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya: Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 503.

3. Memperlakukan sama semua warga negara Utsmani, apapun agama dan madzhab mereka.
4. Menjaga semua hak dan keistimewaan yang dinikmati oleh para pemimpin agama selain Islam.
5. Menghapus semua hambatan aturan agama-agama, agar semua warga negara yang berada di bawah pemerintahan Utsmani berada dalam kedudukan yang sama.
6. Masalah-masalah perdata yang menyangkut warga negara Kristen, khusus menjadi wewenang majelis-majelis Kristen yang merupakan gabungan antara warga negara beragama Kristen dan para pemuka agama Kristen, yang dipilih secara langsung oleh warga negara Kristen bersangkutan.
7. Membuka akademi-akademi untuk orang-orang Kristen agar terbuka bagi mereka kemungkinan bekerja di pemerintahan.
8. Membolehkan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah di dalam wilayah pemerintahan Utsmani sebagaimana yang dijanjikan Sultan dengan cara meminta bantuan dana dan pengalaman negeri-negeri Eropa, dengan tujuan untuk memajukan ekonomi pemerintahan Utsmani.¹⁷

Sultan Abdul Majid I dianggap sebagai Sultan Utsmani pertama yang secara resmi menginisiasi gerakan westernisasi dalam pemerintahan Utsmani. Dialah yang pertama kali mengambil langkah-langkah dalam gerakan ini dengan mengeluarkan perintah resmi tentang reorganisasi pemerintahan pada tahun 1854 dan 1856 M. Perintah resmi ini memulai apa yang disebut sebagai masa

¹⁷ Ash-Shalabi, *Bangkit Runtuhnya Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004),504.

reorganisasi kembali dalam pemerintahan Utsmani, yang pada dasarnya adalah upaya untuk merestrukturisasi masalah-masalah kenegaraan dengan mengadopsi metode Barat. Dengan dua perintah resmi ini, aturan-aturan syariah Islam secara signifikan disingkirkan dan undang-undang positif dibuat serta lembaga-lembaga didirikan. Sultan Abdul Majid sangat dipengaruhi oleh menternya, Rasyid Pasya, yang sangat mengagumi Barat dan mengadopsi filsafat Freemasonry dalam hidupnya. Rasyid Pasya bertanggung jawab atas persiapan generasi penerus yang menjabat sebagai menteri dan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Berkat peranannya, mereka berperan besar dalam mendorong westernisasi yang telah direncanakan olehnya.

Ketika kaum Muslim melihat bahwa pemerintahan menyamakan mereka dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, menggantikan syariah Islam dengan undang-undang Kristen, serta mengganti simbol-simbol yang dihormati dengan simbol Kristen, dan mereka merasa bahwa pemerintahan Rasyid Pasya lebih memihak pada komunitas Kristen dan sangat berhati-hati untuk melindungi mereka dari ancaman, maka terjadi ketidakpuasan yang kuat di kalangan rakyat. Melihat reaksi negatif kaum Muslim Utsmani, Sultan dan pejabat pemerintahannya tidak memiliki pilihan lain selain menurunkan dan menghentikan langkah-langkah tersebut karena takut akan terjadinya pemberontakan dan perlawanan kaum Muslim. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap tekanan dan kebencian yang sangat kuat dari rakyat.

Meskipun pencopotan Rasyid Pasya tidak berhasil menghentikan arus westernisasi dan pengimporan aturan dan hukum dari Barat yang semakin meluas

setelah periode perubahan yang telah dimulai, perlawanan terhadap gerakan Rasyid Pasya pada tahun 1841 berhasil dilakukan.¹⁸ Namun, gerakan ini kembali menguat beberapa tahun kemudian, khususnya pada tahun 1845, dengan dukungan besar dari anggota Freemasonry yang lama telah berkomitmen untuk mengubah struktur pemerintahan Utsmani. Tak lama setelahnya, Rasyid Pasya kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1846, sebelum kemudian diturunkan lagi pada tahun 1858.

Kondisi pemerintahan terus memburuk dan mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu. Hal ini mendorong para pejabat pemerintah untuk memikirkan secara serius tentang sifat perubahan yang diperlukan. Mereka tidak menemukan pilihan lain selain menggunakan pemahaman yang lebih bersifat Eropa dengan melanjutkan proses westernisasi yang telah dimulai. Kita ketahui bahwa banyak pejabat negara telah dikirim oleh pemerintahan Utsmani untuk menjalankan tugas sebagai perwakilan politik luar negeri atau untuk melakukan studi militer di luar negeri. Semua ini terjadi setelah kepergian seorang reformis Islam yang selalu menghalangi para pendukung pemikiran yang tidak lazim dan menyimpang, seorang reformis yang melakukan perubahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Seperti diungkapkan oleh seorang penulis asal Turki Profesor Najib Fadhil; "Oleh karena pemerintahan Utsmani selama tiga atau empat abad kosong dari seorang pemikir besar atau seorang reformis sosial yang besar dan orisinal,

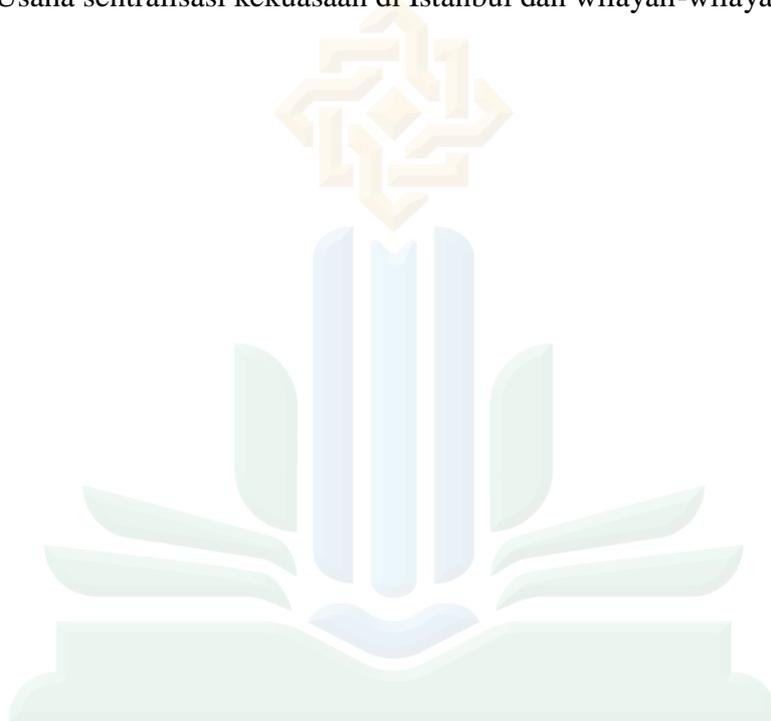
¹⁸ Ali Muhammad Ash-Salabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 504.

maka kini terbuka bagi para diplomat gadungan yang tenggelam dalam pemikiran Barat dan selalu bertaklid pada mereka. Akhirnya, lenyaplah spirit dalam dada mereka, dan lunturlah akal mereka, hilang pula iradah mereka. Terjadilah kelumpuhan di hampir seluruh sektor."

Perang pemikiran telah menjangkiti sebagian besar para pemimpin Turki dan pejabat-pejabatnya. Mereka menempuh cara-cara Eropa dan tidak lagi komitnen dengan agama yang ada. Sampai-sampai 'Allamah Al-Iraqi Al-Alusitakala datang berkunjung pada gubernur Kurkuk Ali Pasya pada tahun 1267 H, dia memujinya karena rasa cintanya pada para ulama dan penghormatannya atas mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian setelah itu dia mengatakan ; "Yang tampak darinya adalah bahwa dia sama sekali tidak lepas dari komitmennya terhadap akidah Islam dan tidak pula bersikap dengan cara-cara orang Eropa. Dimana tidak didengar darinya tentang apa yang dikatakan Lordat dan Paris. Penduduk cukup mendapatkan rahmat karena gubernurnya selama dari semua sifat itu. Dan hanya sedikit orang yang mempunyai peluang mendapatkan rahmat itu disebuah zaman yang sangat hina ini!"

Gelombang westernisasi terus berlanjut dalam usaha mendominasi semua sektor dan sarana yang ada di dalam pemerintahan Utsmani. Intinya, apa yang disebut dengan gerakan pembaruan dan perubahan yang dilakukan didalam pemerintahan Utsmani itu berkisar pada 3 masalah pokok:

1. Mengadopsi Barat dalam hal-hal yang berhubungan dengan organisasi militer dan persenjataannya serta dalam pemerintahan dan administrasinya.
2. Pembentukan orientasi sekuler didalam pemerintahan Utsmani.
3. Usaha sentralisasi kekuasaan di Istanbul dan wilayah-wilayah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan Separatisme adalah gerakan yang berisikan beberapa orang baik itu jumlahnya kecil maupun besar yang berusaha untuk memisahkan diri dari entitas politik Turki Utsmaniyah. Dengan luas wilayah yang begitu besar dan di dalamnya terhuni akan berbagai macam multi etnis baik dari segi agama, budaya, ras, suku, warna kulit yang berbeda yang mencakup keseluruhannya dalam tiga benua yaitu Eropa Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Utara. Itu semua akan memicu peluang yang lebih besar untuk munculnya gerakan-gerakan pemisahan diri seperti yang disebutkan di atas. Penelitian ini mencakup gerakan Separatisme yang berbasis di tanah Arab khususnya di Palestina Utara dengan tokohnya bernama Zahir al-Umar dan di Mesir tokohnya bernama Muhammad Ali.

Mulai abad ke-17 pemerintahan Utsmaniyah sedang menapaki jalan turunan dalam segi pemerintahan. Mereka awalnya adalah negara yang begitu cepat menyebarkan dan menguasai suatu wilayah baru namun pada masa ini mereka lebih banyak untuk mempertahankannya ketimbang memperluasnya lagi. Pemerintahan pusat Istanbul terlalu sibuk akan peperangan di wilayah Balkan dan wilayah Utara Laut Hitam sehingga ini yang mengakibatkan penguasa regional Arab bebas dari kontrol ketat. Utsmaniyah terfokus kepada melawan kerajaan Austria yang berhasil merebut wilayah Hongaria pada tahun 1699 M dan perang panjang melawan Kekaisaran Russia yang berakibat hilangnya wilayah Utsmaniyah di Laut Hitam dan wilayah Kaukasus.

Ketika dalam suatu pemerintahan ada perpecahan di kalangan elit penguasa maka biasanya pihak luar atau bangsa asing akan sangat mudah melakukan intervensi di dalam pemerintahan itu. Inggris dan Prancis menjadi negara kuat pada abad itu dan mereka banyak sekali melakukan intervensi terhadap kedaulatan pemerintahan Utsmaniyah. Mau tidak mau pemerintahan Utsmaniyah melakukan berbagai cara reformasi untuk menghindari campur tangan pihak asing, namun nyatanya mereka tidak mampu mengendalikan perubahan itu, mereka seperti kehilangan nilai-nilai dan jati diri dari Kekhilafahan Islam yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada pembubaran total pada 3 Maret 1924 M.

B. Saran

Penelitian ini memusatkan kepada gerakan-gerakan separatisme yang ada di tanah Arab yang termasuk dalam pemerintahan Utsmaniyah karena pada dasarnya gerakan ini mencoba untuk keluar dari pemerintahan Utsmaniyah. Dalam rentang waktu mulai tahun 1741-1849 M banyak sekali gerakan Separatisme yang muncul kala itu namun penulis memilih gerakan separatisme yang dimotori oleh Zahir al-Umar dan Muhammad Ali di Mesir. Penulis menyadari penelitian ini masih perlu didalami lagi dan mencari tokoh-tokoh yang lain, yang memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh yang penulis teliti. Diharapkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya atau akademisi yang memiliki tema berdekatan dengan ini dapat mencari identitas-identitas yang lain seperti tokoh Ali Bey yang memang dari sejarahnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Zahir al-Umar dan selanjutnya dapat juga mengambil gerakan separatisme yang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hourani, Albert. *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*. Terjemahan oleh Irfan Abubakar. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Al-Jabarti, Abdurrahman. *'Ajaib al-atsar fii at-Tarajum wa al-Akhbar*. Mesir: Yayasan Hindawi, 2017.
- Al-Budayri, Ahmad. *Hawadith Dimashq al-Yawmiyya*. Kairo: Egyptian Association for Historical Studies, 1959.
- Joudah, Ahmad Hasan. *Revolt in Palestine in the Eighteenth Century*. America: Gorgias Press.
- Goffman, Daniel. *The Ottoman Empire and Early Modern Europe*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2004.
- Winter, Michael., Jane Hathaway, Daniel Crecelius, Nelly Hanna dkk. *The Cambridge History of Egypt: Volume 2 Modern Egypt, from 1517 to the end of the twentieth century*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. *Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Sirah Nabawiyah*. Terjemahan oleh Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Rogan, Eugene. *Dari Puncak Khilafah: Sejarah Arab Islam Sejak Era Kejayaan Khilafah Utsmaniyah*. Terjemahan oleh Fahmy Yamani. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2017.
- Mujiyanto, Yan., Zaim Elmubrak. *Pengantar Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010.
- Salmon, W. H. *Account of the Ottoman Coguest*. London: Royal Asiatic Society, 1921.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik, 2005.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Schemerborn, Jhon R. *Basic Organizational Behavior*. Osborn 2 edition, 1998.
- Al-Munyawī, Ramzi. *Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel*. Terjemahan oleh Muhammad Ihsan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Schlesinger, Joseph A. *Ambition and Politics: Political Careers in the United States*. America: Rand McNally, 1966.
- Upe, Ambo. *Tradisi Aliran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Veyne, Paul. *Wraiting History Essai on Epistemologi*. Terjemahan oleh Mina Moore Rinvoluceri. Middletown: Wesleyan University Press, 1984.
- Masters, Bruce. *The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo 1600-1750*. New York: New York University Press, 1988.
- Laoust, Henri. *Les Gouverneurs de Damas*. Damaskus: de Institut Francais de Damas, 1932.

- MA, Hasan Asari. *Sejarah Islam Modern*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandari Maju, 1990.
- Anwar, Syaiful. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Philipp, Thomas. *Kebangkitan dan Kejatuhan Kota Palestina*. New York: PIALA, 2002.
- Doumani, B. *Menemukan Kembali Palestina: Pedagang dan Petani di Jabal Nablus 1700-1900*. Barkeley: Universitas California Press, 1995.
- Yunus, Adb. Rahim. *Historiografi Dunia Islam Modern*. Makassar: Alauddin Universitas Press.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dunia Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003.
- Dahlan, M. *Sejarah Peradaban Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Usman, Ahmad Rofi. *Jejak-jejak Islam Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Bunyan, 2015.
- Newman, L. *An Imam in Paris: Al-Tahtawi's Visit to France 1826-1831*. London: Saqi, 2004.
- Thackston, Wheeler. *Murder, Mayhem, Pillage and plunder: The History of Lebanon in the Eighteenth and Nineteenth Centuries*. Albany: SUNY Press, 1988.
- Hasun, Ali. *Tarikh Al-Daulat Al-'Utsmaniyyah*. Beirut: Maktab Al-Islami,
- Az-Zahrani, Ali. *Al-Inhirafaat Al-'Aqadiyah wa 'Al-Amaliyah*. Makkah: Dar Ar-Risalah.

Skripsi

- Nurdiyana, 2015, "Peran Turki Utsmani di Aljazair dan Sekitarnya Abadd ke 16", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Samsul Ahmad, 2018, "Peranan Muhammadd Ali Pasha Dalam Pengembangan Islam di Mesir", (*Skripsi*, UIN Alauddin, Makassar).
- Ummy Nadhifah, 2019, "Dinasti Turki Utsmani di Masa Pemerintahan Sultan Salim II 1566-1574 M", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Jurnal

- Abu Hanifah Haris, "Sejarah Kerajaan Turki Utsmaniyah dan Sumbangannya dalam Bidang Sosio-Politik", (*Journal of Al-Tamaddun*), Vol. 15, No. 1, 2020, Hal 93.
- M Jannah, "Runtuhnya Turki Utsmani 03 Maret 1924", (*Journal of History*), Vol. 1, No. 1, 2019, Hal 152.
- T. Canaan, "The Saqr Bedouin of Bisan", (*Journal of Palestine Oriental Society*), Vol.16, 1936, Hal 25.

Website Sumber Primer

- Al-Jabarti, Abdurrahman. *'Ajaib al-atsar fii at-Tarajum wa al-Akhbar*. Kairo: Yayasan Hindawi, 2017. <https://www.hindawi.org/contributors/28182839/>

Office of the Historian, Sekretariat Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat,
Undang-undang No.485 tahun 1879 Tentang Konvensi London untuk
Pengamanan Levant, 1-6.

<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1879/d518>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haikal Pasha Gamilang
NIM : U20174025
Prodi : Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Gerakan Separatisme Penguasa Regional Arab Pada Penghujung Era Utsmaniyah 1741-1849 M**" merupakan hasil penelitian atau karya sendiri yang tidak pernah diajukan kepada bidang studi atau institusi lain, serta tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu lain selain penyusun. Dalam hasil penelitian ini, tidak ada unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan disebutkan dalam kutipan di naskah ini yang tercantum dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa adanya keterpaksaan maupun tekanan dari siapapun dan digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar maka saya siap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Jember, 30 Mei 2024
Yang Menyatakan

Haikal Pasha Gamilang
NIM: U20174025

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Haikal Pasha Gamilang
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 20 Juni 1999
Alamat : Jl. PB Sudirman, Desa Panti, Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember.
Email : h900783@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Diponegoro Panti (2003-2005)
2. SDN Prajekan Kidul 02 (2005-2011)
3. MTsN 02 Jember (2011-2014)
4. MA Nurul Jadid Probolinggo (2014-2017)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ubudiyah Nurul Jadid (2014-2017)